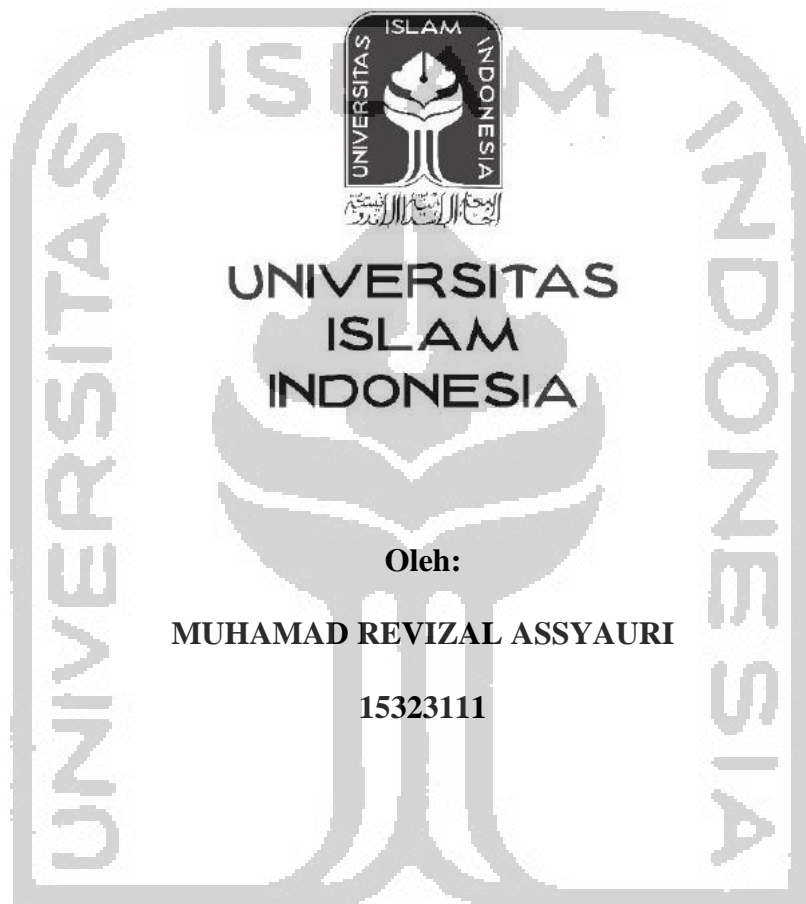


**DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI
KASUS NEGOSIASI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IA-CEPA)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD REVIZAL ASSYAURI

15323111

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

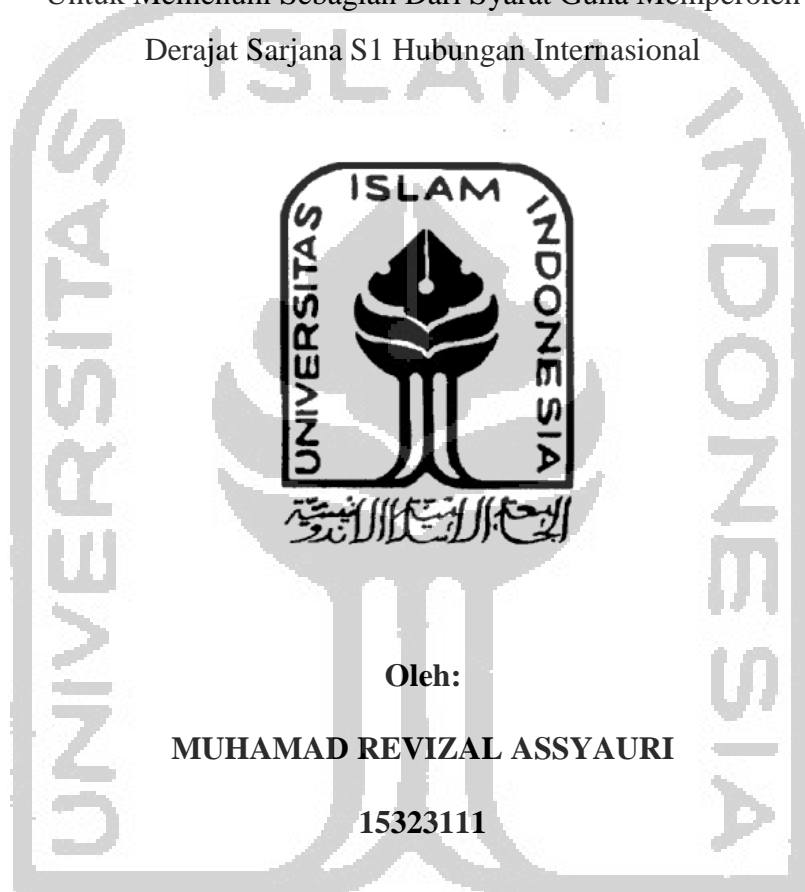
YOGYAKARTA

2019

**DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI
KASUS NEGOSIASI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IA-CEPA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMAD REVIZAL ASSYAURI

15323111

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI
KASUS NEGOSIASI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IA-CEPA)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
18 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pt.

Ketua Program Studi

Enggar Hari-Herdianto S.IP., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
3. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhamad Revizal Assyauri

No. Mahasiswa : 15323111

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Diplomasi Perdagangan Indonesia-Australia: Studi Kasus
Negosiasi Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IA-CEPA)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia, Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 November 2019

Yang menyatakan



Muhamad Revizal Assyauri

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu Tercinta

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini.

Adik-adik Tersayang

Atas semua doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat yang selalu ingin menjadikan penulis lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

Devia Yasinta Hariadi

Terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi dan perhatiannya selama penulis mengerjakan skripsi.

HALAMAN MOTTO

مَا اكْتَسَبْتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
أَبِيهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا تَحْمِيلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

QS Al Baqarah : 286

كَسْبِهِ مِنَ الرَّجُلِ أَكَلَ مَا أَطْيَبَ إِنَّ

”Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri (yang halal)”

Hadist Nabi Muhammad SAW

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera ditangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”

Buya Hamka

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.”

Steve Jobs

“If you can't make it good, at least make it look good.”

Bill Gates

“Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil kecilnya apapun usaha Anda, Anda adalah BOS-nya.”

Bob Sadino

PRAKATA



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Enggar selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan motivasi penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan, diskusi, kesabaran dalam membimbing, meluangkan waktu, dan kemudahan bagi peneliti selama ini, serta selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan

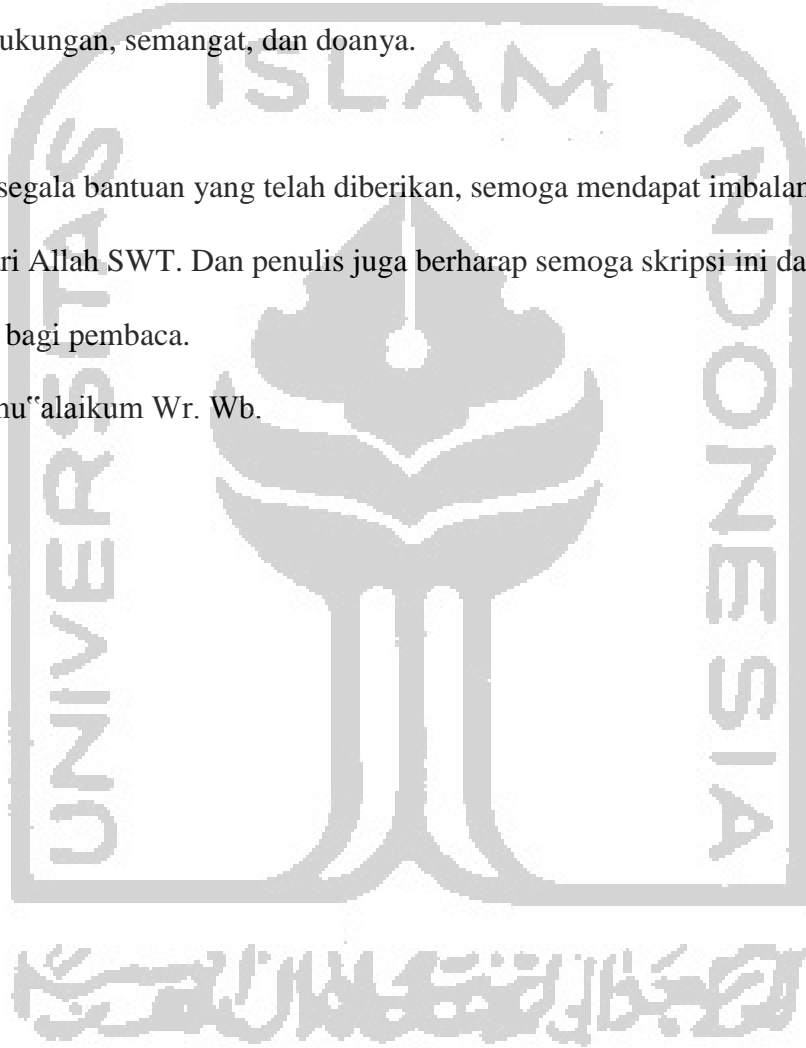
dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang lebih mulia.

4. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
5. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
6. Mba Diah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Adik-adik yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama peneliti mengerjakan skripsi.
9. Devia Yasinta Hariadi memberikan dukungan, motivasi, dan do'a selama peneliti mengerjakan skripsi.
10. Keluarga Besar HmI Komisariat FPSB yang telah menempe peneliti menjadi seseorang yang lebih berguna selama perkuliahan.
11. Keluarga Besar Lembaga FPSB yang telah memberikan kesempatan dalam menempe diri.
12. Keluarga Besar Pencinta Nakbule yang telah memberikan cerita dan guyonannya selama perkuliahan.

13. Keluarga PMSUII yang telah senantiasa menjadi saudara serumpun di tanah perantauan.
14. Keluarga HI Angkatan 15 yang telah bersama – sama dalam berjuang menempuh perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan doanya.

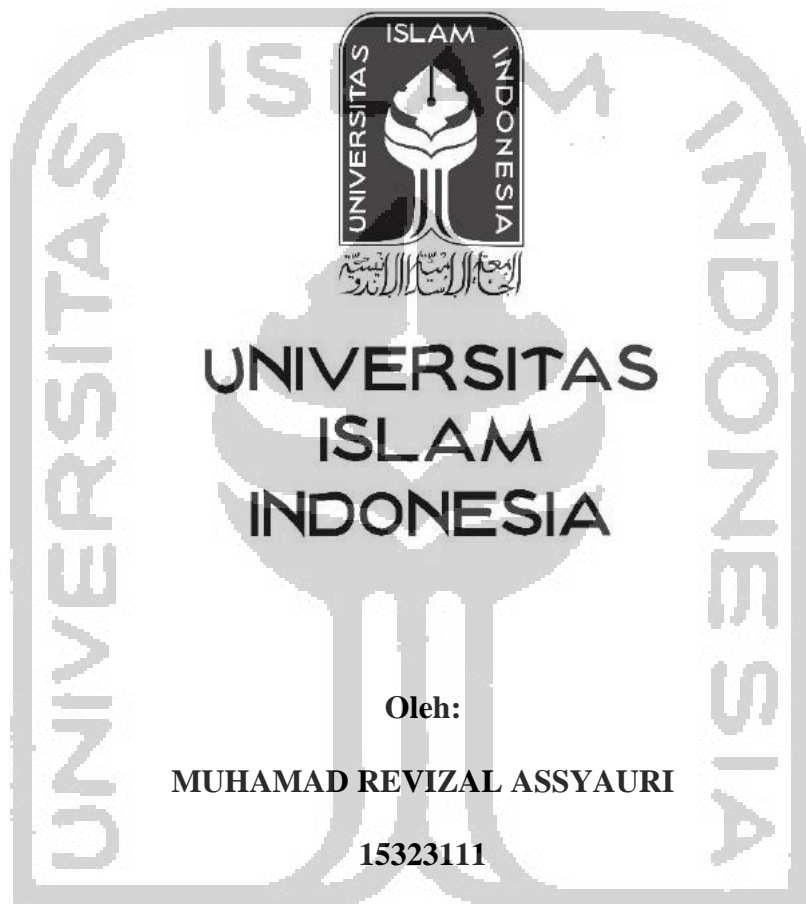
Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI
KASUS NEGOSIASI COMPRHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IA-CEPA)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD REVIZAL ASSYAURI

15323111

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
Abstrak.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN	8
1.4. SIGNIFIKANSI.....	8
1.5. CAKUPAN PENELITIAN	9
1.6 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1.7 LANDASAN KONSEPTUAL.....	14
1.8 METODE PENELITIAN	19
1.8.1 Studi Pustaka	19
1. Pra Riset	20
2. Pengambilan Data.....	20
3. Analisis Data	20
BAB II INDONESIA SEBAGAI LINKER DALAM NEGOSIASI IA-CEPA... 23	
II.1 Indonesia sebagai <i>Linker</i>	23
II. 2. Tujuan yang ingin dicapai Indonesia.....	28
II. 2.1. Tujuan Ekonomi.....	29
II. 2.2. Tujuan Non Ekonomi.....	35
III. 3. Tawaran Linker	38
II. 4. Aspek Win Linker.....	42
II. 5. Aspek Loss Linker.....	43
BAB III	46
AUSTRALIA SEBAGAI LINKEE DALAM NEGOSIASI IA-CEPA.....	46
III.1. Australia sebagai Linkee	46

III.2. Tujuan yang ingin dicapai Australia.....	50
III.2.1 Tujuan Ekonomi.....	51
III.2.2 Tujuan Non Ekonomi.....	54
III.3. Aspek Win Pihak Linkee	57
III.4. Aspek Loss Pihak Linkee.....	58
BAB IV	62
KESIMPULAN.....	62
IV. 1. Kesimpulan.....	62
IV. 2. Rekomendasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Kerangka Pikiran Fragmented Issue Linkage	18
Gambar 2 - Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2030	47
Gambar 3 - Peta Indonesia dan Australia di Kawasan Asia.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Komparasi FTA Australia.....	6
Tabel 2 - Issue Indonesia dan Australia	17
Tabel 3 - Komparasi <i>Structural Power</i> Indonesia dan Australia.....	25
Tabel 4 - Komparasi <i>Geopolitical Power</i> Indonesia dan Australia	26
Tabel 5 - Neraca Perdagangan Indonesia dan Australia Tahun 2014-2019.....	29
Tabel 6 - Sektor Eskpor-Import Indonesia dan Australia Tahun 2014-2019.....	30
Tabel 7 - Komparasi Investasi Australia di Indonesia Tahun 2018-2019.....	34
Tabel 8 - Analisis Penerapan Issue Linkage	63



DAFTAR SINGKATAN

AANZFTA	: ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement
ASEAN	: Association South East Asia Nations
FTA	: Free Trade Agreement
G-20	: 20 Negara
IA-CEPA	:Indonesia–Australia Comprehensive Economic Agreement
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)	: Konferensi Tingkat Tinggi
LOS	: Law of the Sea
MAFTA	: Malaysia Australia Free Trade Agreement
RCEP	: Comprehensive Economic Partnership
SAFTA	: Singapore Australia Free Trade Agreement
TAFTA	: Thailand Australia Free Trade Agreement
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
UU	: Undang-Undang



Abstrak

Kerangka konsep negosiasi IA-CEPA yang telah diwacanakan pada tahun 2005 melalui beberapa tahap, berhasil diluncurkan pada tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, negosiasi tersebut terhenti pada tahun 2013-2016. Melalui konsolidasi harmonisasi hubungan kedua negara, negosiasi kembali diaktifkan pada tahun 2016. Akhirnya pada tahun 2019, kedua negara telah menyelesaikan negosiasi secara substansi dasar. Dari tahun 2010 hingga tahun 2019, negosiasi IA-CEPA telah melakukan 12 kali putaran, berdasarkan hal tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: **mengapa negosiasi IA-CEPA berlangsung dalam 12 kali putaran selama sembilan tahun?** Guna menjawab pertanyaan rumusan masalah, penulis menggunakan konsep Issue linkage yang diperkenalkan oleh Ernest B. Hass. Penggunaan konsep Issue Linkage tersebut akan mampu menjawab pertanyaan penelitian, karena negosiasi IA-CEPA tidak hanya dapat dilihat sebagai issue ekonomi saja. Issue non-ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dalam penyelesaian negosiasi ini. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis keterkaitan issue – issue yang berperan dalam menghambat negosiasi ini diselesaikan.

Abstract

A concept framework from IA-CEPA negotiation which have been planned from 2005 through some steps, successfully launched in 2010. While the time passed, the negotiation stopped in 2013-2016. By a harmonization consolidation of the both nations, the negotiation was activated back in 2016. Finally in 2019, both nations have been accomplished the negotiation with the basic substance. From 2010 until 2019, the negotiation between IA-CEPA have been considered for 12 rounds, based on that considerations, the writer concluded some rationals: **why IA-CEPA negotiation was occurred in 12 rounds for nine years?** In order to answer this question, the writer used the Issue Linkage concept which have been introduced by Ernest B. Hass. The used of Issue Linkage concept answer the investigation question, because IA-CEPA negotiation not only can be seen as an economic issue. Non-economic issues have a very tight relationship in this negotiation solution. Therefore, this investigation will analyze the issues linkage that caused in this negotiation inhibit finished.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hubungan Indonesia – Australia dalam bidang perdagangan tidak begitu harmonis. Dengan letak geografis yang sangat dekat, hal tersebut cukup disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan di masing-masing negara tidak menjadi prioritas utama sebagai mitra perdagangan internasional. Dengan melihat hubungan perdagangan tersebut serta untuk meningkatkan harmonisasi hubungan perekonomian, kedua negara bersepakat untuk meningkatkan nilai perdagangannya melalui kerangka kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Sebelum kerangka kerja IA-CEPA sendiri dinegosiasikan, kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama perdagangan melalui kerangka perjanjian (ASEAN – Australia and New Zealand Free Trade Agreement) AANZFTA yang telah disepakati sejak tahun 2010, dalam hal ini negosiasi kerangka kerjasama IA-CEPA mengikuti acuan yang telah disepakati dalam AANZFTA. Dengan begitu, dalam pelaksanaannya anggota negara ASEAN yang akan melakukan negosiasi bilateral dengan Australia ataupun New Zealand harus mengacu pada perundingan AANZFTA. (Kemendag, 2016)

Walaupun kedua negara telah tergabung dalam kerangka kerja AANZFTA, hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan mengenai hubungan perdagangan kedua negara. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwa nilai investasi dan perdagangan Indonesia mengalami pasang surut. Dalam tabel dijelaskan bahwa angka tertinggi investasi Australia pada tahun 2011 senilai 743,6 juta US\$ dan perdagangan Indonesia – Australia pada tahun 2012 mencapai 10,8

milliar US\$. Investasi paling rendah Australia ke Indonesia pada tahun 2018 senilai 4,1 miliar US\$ dan perdagangan paling rendah senilai 89,7 juta US\$ pada tahun 2011.

Awal mula terbentuknya IA-CEPA pada tahun 2005 Indonesia dan Australia sepakat untuk membahas kerjasama perekonomian kedua negara melalui *Joint Declaration Comprehensive Partnership*. Pembahasan berlanjut pada tahap *joint Feasibility Study* yang diselenggarakan pada tahun 2007 dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan akademis guna mengkaji serta menganalisis peluang dan hambatan – hambatan yang akan terjadi. Setelah pembahasan mengenai analisis selesai, Indonesia – Australia yang diwakilkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Indonesia) dan Julia Gillard (Perdana Menteri Australia) sepakat untuk meluncurkan negosiasi pada tahun 2010 (kemendag, 2017). Terdapat poin – poin penting yang akan menjadi acuan utama bagi kedua negara dalam membahas kerangka negosiasi IA-CEPA.

Adapun cakupan utama yang tertuang dalam IA-CEPA adalah sebagai berikut, terdapat tiga poin utama yang menjadi acuan negosiasi IA-CEPA. Pertama yaitu momentum, yang dimaksud momentum adalah negosiasi ini merupakan momentum bagi kedua negara untuk meningkatkan perekonomian dan berperan dalam *Global Value Chain*. Poin kedua yaitu kemitraan, maksudnya adalah negosiasi IA-CEPA bukan hanya membahas tentang barang, jasa dan investasi, lebih dari itu terdapat *Vocational Education Training, Higher Educational and Health sector*. Poin ketiga adalah saling menguntungkan, yang mana dari negosiasi ini diharapkan menjadi perjanjian yang menghasilkan keuntungan yang berimbang dan dapat diimplementasikan dalam jangka panjang

(Kemendag, 2018). Dalam kerangka kerja IA-CEPA yang luas, membutuhkan analisis mendetail serta kajian yang luas, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap lamanya negosiasi tersebut dilangsungkan. Sampai proses negosiasi tersebut selesai secara teknis, semenjak peluncuran IA-CEPA telah mengadakan putaran sebanyak 12 kali selama delapan tahun (2010-2018).

Diplomasi perdagangan IA-CEPA telah dinegosiasikan sebanyak 12 kali putaran, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Sejak awal peluncuran negosiasi IA-CEPA pada 2 November 2010, pada tahun 2011 kondisi ekonomi kedua negara mengalami ketidakharmonisan hubungan dikarenakan permasalahan ekspor – impor sapi dengan penghentian sementara ekspor sapi Australia ke Indonesia, yang mengakibatkan penurunan pendapatan peternak sapi Australia dan kelangkaan daging sapi di Indonesia yang mengakibatkan harga daging sapi tidak stabil. Maka dari itu, kedua negara baru dapat menggelar putaran pertama dan kedua pada bulan September 2012 hingga bulan Juli 2013, dengan hasil putaran pertama menyepakati permasalahan prosedural IA-CEPA seperti prinsip, tujuan dan organisasi negosiasi. Putaran kedua IA-CEPA berfokus terhadap pembahasan kerja sama ekonomi dan keterlibatan dari para pemangku kebijakan (DFAT, 2013). Setelah terselenggarakannya putaran pertama dan kedua, negosiasi ini terhenti pada bulan November 2013 – Februari 2016 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Tony Abbot (Perdana Menteri Australia), dikarenakan kasus penyadapan pemerintah Australia terhadap Indonesia serta hukuman mati penyelundupan narkoba warga negara Australia hingga kasus beroperasinya Angkatan Laut Australia di perairan Indonesia (Kemendag, 2018).

Setelah negosiasi dihentikan sementara pada tahun 2013 – 2016, Joko Widodo (Presiden Indonesia) dan Malcolm Turnbull (Perdana Menteri Australia) sepakat untuk membuka kembali putaran ketiga negosiasi IA-CEPA, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2016. Dalam putaran ketiga, kedua pemerintah menyetujui reaktivitas negosiasi IA-CEPA dengan poin utamanya membentuk kerja sama yang komprehensif dan lebih modern (perdagangan, 2016).

Putaran keempat dan putaran kelima pada bulan Agustus hingga November 2016. Putaran keempat membahas lebih mendetail terkait perdagangan barang, jasa, investasi, kerja sama ekonomi, perdagangan elektronik, persaingan, dan kerangka kelembagaan. Putaran kelima membahas tawaran akses pasar barang dan jasa, yang menarik dari pertemuan kelima adalah akses pasar, Indonesia dengan penduduk 250 juta dan Australia dengan penduduk 25 juta, dapat dilihat perbandingannya yaitu 10:1 bahwa Australia memiliki pasar yang lebih luas daripada Indonesia, hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi negosiasi IA-CEPA (DFAT, 2016).

Putaran keenam, ketujuh, dan kedelapan terselenggara pada bulan Februari - Agustus 2017. Putaran keenam IA-CEPA, membahas topik merevisi tawaran akses pasar barang dan jasa, Putaran ketujuh membahas topik merevisi tawaran akses pasar untuk barang serta jasa dan awal untuk akses pasar investasi. Putaran kedelapan membahas revisi tawaran akses pasar barang serta investasi dan kedua delegasi berkomitmen akan menyelesaikan IA-CEPA pada akhir tahun 2017. Pada tiga kali putaran ini dapat dilihat, bahwa yang menjadi pembahasan utama adalah revisi akses pasar barang, jasa, dan investasi (DFAT, 2017).

Pada putaran kesembilan dan Putaran kesepuluh pada bulan Oktober-November 2017. Hal yang menarik adalah Menteri perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita turut hadir dan mendesak negosiator untuk merampungkan negosiasi IA-CEPA, dengan membahas topik yang sama barang, jasa, investasi, kerja sama ekonomi, kerangka kerja, dan ketentuan kelembagaan. Sampai pada putaran ke Sembilan delegasi kedua negara belum menunjukkan akan mengakhiri negosiasi IA-CEPA ini. Putaran kesepuluh pertemuan ini merupakan bentuk dari percepatan perampungan negosiasi IA-CEPA, putaran selanjutnya diadakan pada awal Desember 2017 guna menjaga komitmen keduanya untuk mengakhiri negosiasi ini pada akhir 2017. yang menyebabkan mundurnya negosiasi IA-CEPA dari jadwal yang ditentukan adalah bertolak belakangnya hukum masing – masing negara, Indonesia memiliki undang undang dalam daftar *negative list* bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tidak boleh melebihi 49% sahamnya. Bahkan pada bulan November 2017 kedua pemimpin negeri sempat bertemu di sela sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan menekan untuk mempercepat proses penyelesaian negosiasi IA-CEPA (DFAT, 2017).

Putaran kesebelas dan keduabelas pada bulan Desember 2017-Juli 2018, pembahasan membahas permasalahan yang sama dengan menggunakan pendekatan *negative list* dalam daftar Indonesia yang diprioritaskan yakni kesehatan dan pendidikan dan kedua negara harus dapat mempertahankan komitmen sampai tahap pelaksanaannya. Putaran keduabelas negosiasi ini akhirnya menyepakati substansi dasar IA-CEPA, dan akan berlanjut pada tahap peninjauan kembali hingga proses penulisan teks hukum kedalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (Kemendag, 2018). Selesaiannya negosiasi ini secara teknis,

dengan menyepakati pembahasan Indonesia mengizinkan perusahaan asing memiliki 67% saham di bidang pendidikan dan hal itu tidak diberikan oleh Indonesia kepada negara lain. Penandatanganan kesepakatan IA-CEPA di selenggarakan di Istana Negara Jakarta yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang disaksikan oleh Joko Widodo dan Scott Morrison (Perdana Menteri Australia) pada tanggal 2 Agustus 2018.

Sejak dimulainya peluncuran negosiasi IA-CEPA hingga pada tahun 2018 telah terlesengara putaran sebanyak 12 kali dalam waktu selama delapan tahun. Pada putaran ke 12 kedua pemerintahan menyepakati substansi dasar dari negosiasi IA-CEPA. Dengan putaran yang diselenggarakan sebanyak 12 kali dalam delapan tahun merupakan waktu yang lama, jika dibandingkan FTA Australia lainnya. Berikut adalah tabel perbandingan negosiasi FTA Australia dengan negara lainnya:

Tabel 1 - Komparasi FTA Australia

No.	Negara	Tahun	Putaran
1.	Amerika Serikat	2002-2004	6
2.	China	2005-2014	21
3.	Chili	2007-2008	4
4	Hong Kong	2017-2018	6
5.	Indonesia	2010-2018	12
6.	Korea	2008-2013	6
7.	Jepang	2007-2014	16
8.	Malaysia	2005-2012	11

9.	Peru	2017-2017	3
10.	Singapura	2001-2002	2
11.	Thailand	2002-2003	3
12.	Selandia baru	1980-1982	6

sumber: DFAT, 2018.

Berdasarkan dari 12 negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang dilaksanakan oleh Australia normalnya dilaksanakan dalam waktu 2 tahun dalam 3-6 putaran. Malaysia melaksanakan negosiasi selama tujuh tahun dalam 11 putaran karena dari tahun 2006-2011 kedua negara fokus untuk menegosiasikan AANZFTA. Jepang melaksanakan 16 putaran dalam waktu tujuh tahun. China merupakan negara yang paling lama dalam menyelesaikan negosiasi dengan Australia, 21 putaran dalam Sembilan tahun. Dalam hal ini, negosiasi Indonesia-Australia menghabiskan 12 putaran dalam waktu delapan tahun merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Australia dalam mencapai kesepakatan negosiasi. Dengan begitu walaupun Australia-China FTA merupakan negosiasi paling lama, Indonesia merupakan salah satu negara yang lama dalam menyelesaikan negosiasi dengan Australia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Mengapa negosiasi IA-CEPA berlangsung dalam 12 putaran selama delapan tahun ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mengapa negosiasi IA-CEPA memakan waktu lebih lama dibanding negosiasi perjanjian perdagangan bebas pada umumnya
2. Untuk mengetahui sektor unggulan yang menjadi prioritas utama kedua negara dalam IA-CEPA.
3. Untuk mengetahui komitmen masing – masing negara dalam mencapai kesepakatan IA-CEPA.

1.4. SIGNIFIKANSI

Analisis hubungan politik perdagangan bilateral merupakan suatu hal biasa dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, seperti halnya hubungan politik perdagangan Indonesia – Malaysia terkait *Issue* Kelapa Sawit, Indonesia – Amerika Serikat terkait *Issue* tembakau, bahkan hubungan politik perdagangan Indonesia – Australia sekalipun. Memang terdengar biasa saja, akan tetapi ketika melihat dari perspektif yang berbeda dan bahkan belum ada sama sekali yang membahasnya, hal tersebut terdengar lebih menarik dan baru dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, seperti halnya yang sekarang penulis sedang teliti. Banyak dari beberapa peneliti sebelumnya yang melihat hubungan politik perdagangan bilateral Indonesia – Australia dari perspektif *mainstream*, seperti halnya peluang dan tantangan kedua negara dalam IA-CEPA, Alasan Australia kembali membuka negosiasi IA-CEPA dan lain sebagainya. Berbeda dengan kasus diatas yang diangkat sebelumnya, penulis akan membahas kasus diplomasi IA-CEPA dengan menggunakan persepektif *Issue Linkage*, yang mana *Issue Linkage* akan melihat persepektif IA-CEPA dikesampingkan oleh *Issue* yang

lainnya. Adapun yang menarik dari pembahasan disini adalah *Issue Linkage* tidak hanya melihat pada satu *Issue* saja, melainkan dengan melihat beberapa *Issue* yang mengenyampingkan diplomasi IA-CEPA itu sendiri. Lebih lanjut, Konsep *Issue Linkage* belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam menganalisis diplomasi IA-CEPA.

1.5. CAKUPAN PENELITIAN

Cakupan riset ini adalah politik perdagangan bilateral antar dua negara. Studi kasus yang diangkat adalah antara Indonesia dan Australia mengenai diplomasi perdagangan IA-CEPA, adapun dalam riset ini akan melihat dari perspektif *Issue Linkage* yang mana IA-CEPA tersebut terkesampingkan dengan kasus – kasus lain yang terjadi antar kedua negara. IA-CEPA memulai putaran pertama nya pada tahun 2010, yang mana hingga tahun 2018 putaran negosiasi telah selesai dan disepakati secara teknis. Penulis akan menganalisis dari putaran pertama hingga terakhir yakni dari tahun 2010-2018. Diplomasi ini merupakan salah satu negosiasi terpanjang dalam sejarah Indonesia ataupun Australia, dan pada rentang masa waktu itu pun, banyak hal – hal yang terjadi dengan tanpa disadari telah membuat hubungan kedua negara merenggang. Menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana beberapa *Issue* tersebut dapat mengenyampingkan Diplomasi IA-CEPA.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ann Capling, dalam jangka waktu selama 10 tahun dari pemerintahan Howard hingga pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2008 Australia mengalami kebimbangan dalam mengambil kebijakan luar negerinya, lebih spesifik dalam pembahasannya mengenai Kawasan Asia Pasifik (Capling,

2008). Howard mulai menjalin kedekatannya dengan negara – negara di Kawasan tersebut, terlihat dengan terbentuknya perjanjian dengan New Zealand dan ASEAN. Dalam pembahasan tersebut yang menjadi dilema adalah kebijakan luar negeri Australia tidak terfokus terhadap satu titik, baik itu secara global, regional ataupun bilateral. Ketika kebijakan luar negerinya difokuskan ke negara Kawasan Asia Pasifik, Australia masih dalam bayang – bayang mengenai kebijakan luar negerinya dengan Amerika Serikat. Dalam riset ini dapat dilihat bahwa yang menjadi tantangan Australia adalah bagaimana Australia menjalankan kebijakan luar negerinya, ketika kebijakan multilateral berpengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Australia, sedangkan kebijakan luar negeri regional ataupun Bilateral sama pentingnya dengan posisi Australia di Kawasan Asia Pasifik (Capling, 2008, p. 273).

John Ravenhill melihat bahwa hubungan Australia dengan Amerika Serikat merupakan prioritas utama (kerja sama keamanan) (Ravenhill J. , Symposium: Australia–US Economic Relations and the Regional Balance of Power Introduction, 2013). Dalam hal keamanan Australia berada dalam bayang-bayang Amerika Serikat, namun, kebangkitan abad Asia semakin terbukti dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok. Hal tersebut tentunya merupakan ancaman sekaligus menjadi sebuah keuntungan bagi Australia dalam memanfaatkan posisi nya diantara kekuatan besar dunia. Asia merupakan pasar terbesar dan perekonomian terbesar dunia, yang hal itu merupakan peluang bagi Australia dalam perekonomian global. Ravenhill membuat pandangannya semakin jelas bahwa hubungan perekonomian Australia dengan Asia sangat besar , akan tetapi secara bersamaan dalam hal keamanan Asia dilihat sebagai suatu ancaman

(Ravenhill J. , Symposium: Australia–US Economic Relations and the Regional Balance of Power Introduction, 2013, p. 182).

Ann Capling dan John Ravenhill memperjelas kebingungan Australia dalam kebijakan luar negerinya. Mereka melihat bahwa posisi Australia berada di tengah – tengah kekuatan terbesar dunia yakni Asia (Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara) dan Amerika Serikat riset (Ravenhill A. C., 2015). Capling dan Ravenhill menjelaskan kemana Australia akan berlabuh, TPP atau RCEP. TPP menawarkan kebijakan pasar yang lebih bebas dengan sesama anggota, sedangkan RCEP menawarkan proteksionisme pertanian oleh negara – negara Asia, khususnya India dan China. Mereka melihat bahwa TPP dan RCEP saling bertolak belakang satu sama lain, dalam hal ini adalah potensi Amerika Serikat untuk memperbesar kemungkinan masuknya pertanian dan jasa dalam TPP akan mempermudah langkah Australia dalam pasar bebas Asia, sedangkan dalam RCEP memiliki perjanjian yang terbatas untuk sektor pasar dan jasa Australia. Dengan begitu semua faktor tersebut merupakan tantangan bagi Australia dalam menghadapi pengaruh Asia dan Amerika Serikat dalam pengambilan kebijakan luar negerinya (Ravenhill A. C., 2015, p. 505).

Melanjutkan apa yang dituliskan oleh penulis sebelumnya mengenai hubungannya dengan Asia, kebingungan Australia berdampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, seperti yang ditulis oleh Vinsesoio M.A. Dugis (Dugis, 2016), bahwa hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut ibaratkan *Roller Coaster*. Dugis mencoba untuk melihat bagaimana hubungan keduanya dapat bertahan hingga saat ini dalam bayang bayang konflik yang pernah terjadi. Dimulai dari *Jenkins Affair*, swasembada sapi Australia,

penyadapan terhadap Pejabat Tinggi Indonesia hingga pada kasus eksekusi mati terpidana narkoba warga Australia. Dugis, melihat harapan pada kepemimpinan Joko Widodo dengan Tony Abbot hingga Marcolm Turnbull akan memperkokoh hubungan Indonesia dan Australia, hal tersebut ditandai dengan kunjungan Tony Abbot pada acara pelantikan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga pada keakrabannya Marcolm Turnbull dan Joko Widodo dalam hidangan makan siang di Istana Negara. Kunjungan dua Perdana Menteri Australia tersebut memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki hubungan yang harmonis, melihat kepemimpinan Australia sebelumnya tidak seintens melakukan pertemuan dengan pemerintahan Indonesia, bahkan Dugis menuliskan bahwa pemerintah Indonesia sempat menarik Duta Besar Indonesia dari Canberra selama 14 hari pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Tony Abbot (Dugis, 2016, p. 320).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Dugis mengenai harapan harmonisasi hubungan Indonesia dan Australia, Yeti melihat bahwa sebelum perjanjian tersebut diimplikasikan secara menyeluruh, terdapat beberapa poin yang dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri Indonesia dengan Australia. Dengan begitu jika kesepakatan ini dapat diselenggarakan dengan cepat, hubungan Indonesia dan Australia akan semakin intens yang berdampak terhadap peningkatan perdagangan kedua negara (Yeti Indriani, 2017, p. 88).

Beberapa literatur di atas, menggambarkan bagaimana Australia menjalin mengeluarkan kebijakan luar negerinya dengan sangat kompleks, akan tetapi hanya dilihat dari faktor tertentu saja. Seperti halnya, riset Ann Capling yang menunjukkan bahwa Australia ragu dalam mengambil kebijakan luar negeri. Australia tidak ragu, hal itu merupakan tindakan kehati-hatian dalam setiap

kebijakan yang akan diputuskan. Seperti halnya melakukan negosiasi dengan Indonesia melalui kerangka IA-CEPA, yang mana hal tersebut merupakan keberlanjutan dari perjanjian AANZFTA. Australia tidak ingin tergesa – gesa dengan menyelesaikan negosiasi ini, karena posisi dari Indonesia sendiri sangat strategis dalam keberlangsungan Australia baik itu secara ekonomi ataupun keamanan. Dalam hal ini Australia tidak ragu dalam mengambil kebijakan, akan tetapi Australia memastikan bagaimana posisi rundingnya dengan Indonesia dan implikasinya terhadap keadaan politik global.

Sama halnya dengan Vinsensio M.A. Dugis yang hanya melihat harmonisasi hubungan kedua negara tidak secara menyeluruh, Vinsensio hanya melihat dari kehangatan kedua pimpinan negara saat ini. Yeti Indriyani pun, hanya melihat dari beberapa faktor saja yang mencakup IA-CEPA. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa negosiasi IA-CEPA ini bukan hanya membicarakan mengenai harmonisasi kedua negara ataupun regional bagi setiap kawasan, penulis melihat lebih jauh bahwa negosiasi IA-CEPA ini merupakan perjanjian yang dibentuk oleh kedua pihak yang memiliki kekuatan di kawasan Asia Pasifik, terkhusus dengan posisinya yang dipengaruhi oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Dengan begitu bukan bagaimana kedua negara ini dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi melalui kerangka IA-CEPA, akan tetapi bagaimana kedua negara ini dapat membuat poros baru dalam mengimbangi perekonomian global yang dipengaruhi oleh Tiongkok dan Amerika Serikat.

Berdasar penjelasan di atas, Penulis akan menganalisis hubungan politik perdagangan bilateral kedua negara dengan melihat *Issue – Issue* yang mengenyampingkan diplomasi IA-CEPA itu sendiri. Dengan melihat berbagai

Issue tersebut dapat melihat lebih luas dan detail bagaimana kedua negara melakukan negosiasi penyelesaian IA CEPA. . risetriset . Hubungan politik perdagangan bilateral mengenai negosiasi IA-CEPA tidak hanya dapat dilihat dari satu *Issue* saja, melainkan harus melihatnya dari berbagai *Issue*, karena dalam hal ini IA-CEPA bukan hanya sekedar hubungan bilateral sementara, melainkan hubungan yang bersifat keberlanjutan yang berdampak terhadap lingkungan sosial kedua negara. Persepektif manapun, tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana alotnya negosiasi ini terjadi, dan tidak hanya dapat dilihat dari satu *Issue* saja, misalkan dari segi politik, ekonomi, bahkan hukum. Semuanya harus dapat dilihat dan dianalisis, sehingga dapat melihat lebih spesifik dalam menganalisis hubungan politik perdagangan kedua negara.

1.7 LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam riset ini penulis akan menggunakan Teori *Issue Linkage* menurut Ernest B. Haas. *Issue Linkage* adalah upaya negosiasi yang menghubungkan isu yang berbeda guna mencapai perjanjian diantara kedua belah pihak. Menurut Haas, karena pengetahuan dan tujuan sosial tidak selalu berjalan bersama dan senantiasa berubah, maka setiap negosiasi harus dilihat dalam berbagai isu, agar menghasilkan kesepakatan yang ingin dicapai. Haas memberikan contoh bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak melihat hubungan antara energi nuklir dan proliferasi senjata nuklir selama keduanya dapat mengendalikan proses difusi teknologi, rezim *non-proliferasi* hanya akan terbentuk ketika difusi teknologi itu tidak terkendali (Haas E. B., 1980, p. 371).

Dalam negosiasi, kerja sama atau konflik adalah suatu keniscayaan. Seperti “pisau bermata dua”, tergantung para pihak menggunakan negosiasi tersebut. Haas menjelaskan contoh kasus mengenai “pisau bermata dua” ini, perjanjian

antara Inggris dan Argentina mengenai investasi produksi daging sapi, bantuan teknologi listrik, hingga *transfer* teknologi, yang mana perjanjian tersebut saling menguntungkan kedua negara. Namun, hingga Inggris melakukan intervensi militernya terhadap Argentina, perjanjian tersebut berubah menjadi konflik. Haas menjelaskan bahwa harus ada hubungan ketergantungan, jika kedua negara ingin melanjutkan kerjasama, meskipun dalam keadaan konflik. Ketergantungan yang dimaksudkan adalah memahami keuntungan dan kerugian jika kedua negara tidak melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut. (Haas E. B., 1980, p. 362)

Dalam menganalisis lebih lanjut, Haas mengklasifikasikan tahapan *issue linkage* menjadi tiga bagian: (1) Masalah; (2) Menghubungkan masalah; (3) Cakupan masalah. Dalam kasus IA-CEPA penulis mengklasifikasikan sebagai berikut (1) konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia; (2) mengakibatkan negosiasi IA-CEPA terhenti; (3) sehingga berdampak terhadap negosiasi IA-CEPA berjalan sangat lama.

Penerapan *Issue Linkage* kebanyakan meneliti pada kasus yang berhasil, hal yang membedakan riset ini dengan riset pada umumnya adalah ketika konsep *Issue Linkage* diterapkan pada studi kasus negosiasi perdagangan yang belum selesai. Dengan mengklasifikasikan menjadi tiga bagian tersebut mempermudah penulis dalam menganalisis kasus negosiasi IA-CEPA yang memakan waktu lama daripada perjanjian perdagangan Australia pada umumnya.

Haas mengategorikan pendekatan *Issue Linkage* menjadi tiga bagian yaitu *Tactical Issue linkage*, *Fragmented Issue linkage*, and *Substantive Issue linkage*.

1. *Tactical Issue Linkage* adalah upaya negosiasi dengan menghubungkan sesama ekonomi, ataupun masalah ekonomi dengan *non-ekonomi*

kedalam lingkup perjanjian, agar terjadi tawar menawar hingga mencapai *quid pro quo*¹.

2. *Fragmented Issue Linkage* adalah upaya negosiasi menyatukan berbagai masalah untuk mencapai tujuan sosial utama, walaupun terjadi ketidakpastian dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, ketidakpastian tersebut dapat memperkuat hubungan dalam mempertimbangkan sumber daya, sebab, dan akibat untuk mempertahankan negosiasi kedua belah pihak. Contoh kasus: Negosiasi LOS dalam UNCTAD untuk mengatur batasan – batasan penggunaan sumber daya diatas dan didalam laut. (Haas E. B., 1980, p. 367)
3. *Substantive Issue Linkage* adalah suatu upaya negosiasi dengan menghubungkan berbagai masalah dengan menggunakan strategi intelektual, guna mencapai keuntungan yang lebih besar. Contoh kasus: Insinyur, ilmuwan, ekonom, pegawai negeri Amerika Latin bergabung untuk mencapai kesepakatan kemajuan teknologi. (Haas E. B., 1980, p. 374)

Dalam *Issue linkage* Haas mengkategorikan para pihak yang sedang melakukan negosiasi menjadi *linker and linkee*. *Linker* adalah pihak yang memiliki kekuatan (menawarkan) dibandingkan dengan pihak *linkee*, *linkee* sebaliknya memiliki posisi yang lemah (memilih tawaran) dihadapan *linker*. Dalam kasus IA-CEPA penulis mengkategorikan Indonesia sebagai *Linker* dan Australia sebagai *Linkee*, karena Indonesia memiliki akses pasar yang lebih besar daripada Australia, dapat dilihat dalam negosiasi IA-CEPA Indonesia tidak

¹ Saling menguntungkan

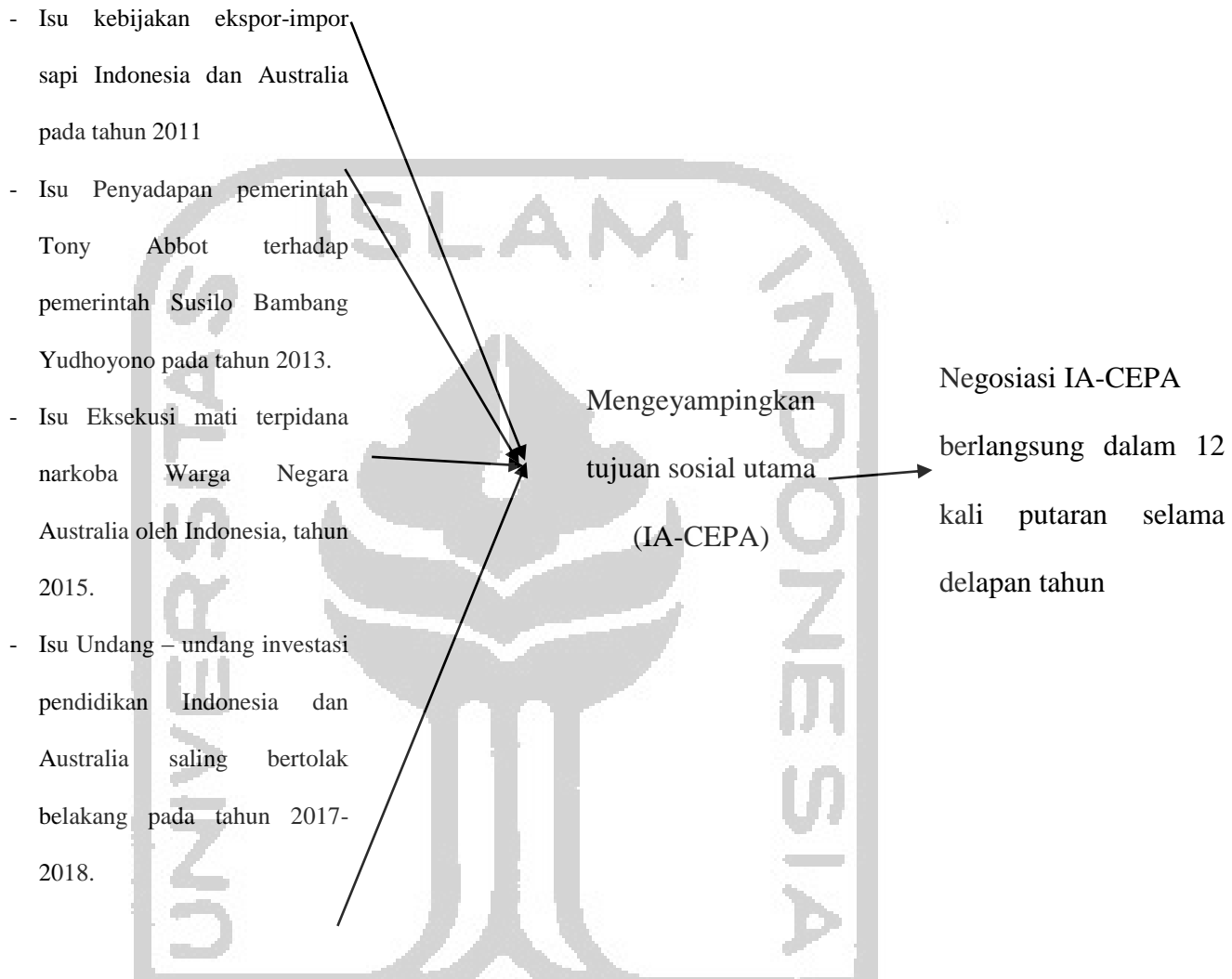
sepakat dengan investasi di bidang pendidikan 100%, karena bertolak belakang dengan undang – undang domestik Indonesia yang hanya mencapai 49%. Pada akhirnya Indonesia menawarkan 67% untuk investasi asing di bidang pendidikan.

Berdasar paparan Haas mengenai ketiga klasifikasi *issue linkage* tersebut, penulis menilai *Fragmented Issue Linkage* lebih tepat diterapkan untuk menganalisis diplomasi IA-CEPA yang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan perjanjian perdagangan Australia lainnya. Dalam menganalisis masalah yang terjadi di antara para pihak, setidaknya terdapat empat masalah yang mengakibatkan negosiasi IA-CEPA memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perjanjian perdagangan Australia lainnya:

Tabel 2 - Issue Indonesia dan Australia

No	Isu	Keterangan	Tahun
1	Ekonomi	Kebijakan perdagangan Sapi	2011
2	Politik	Penyadapan pemerintah Tony Abbot terhadap pemerintah SBY	2013
3	Hak Asasi Manusia	Eksekusi mati pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Australia	2015
4	Ekonomi	Undang – undang Investasi pendidikan Indonesia dan Australia bertolak belakang	2017-2018

Gambar 1 - Kerangka Pikiran *Fragmented Issue Linkage*



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, dengan menggunakan *Fragmented Issue Linkage* Indonesia dan Australia mengesampingkan tujuan sosial utama, karena permasalahan yang terjadi di antara para pihak, sehingga menyebabkan negosiasi IA-CEPA ini memakan waktu lebih lama dibanding perjanjian perdagangan Australia lainnya. Dalam menganalisis lebih jelas, *Fragmented Issue linkage* melihat ketidakpastian/keraguan terhadap para pihak dalam melanjutkan negosiasi IA-CEPA. Dengan mempertimbangkan sumber

daya, sebab – akibat, seperti halnya bertolak belakang undang – undang investasi pendidikan Indonesia dan Australia. Dengan pertimbangan tersebut, para pihak tetap melanjutkan negosiasi IA-CEPA hingga selesai, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa perjanjian IA-CEPA memakan waktu lebih lama dibanding dengan perjanjian perdagangan Australia lainnya. *Fragmented Issue Linkage* dapat menjelaskan isu-isu yang berhubungan dengan negosiasi IA-CEPA. Dengan begitu riset ini merupakan riset berbeda yang melengkapi pada kasus yang sama dalam konsep *Issue Linkage*.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Studi Pustaka

Dalam riset ini, penulis melihat pentingnya data-data dan juga analisis yang dapat menunjang tulisan ini guna menjawab mengapa negosiasi IA-CEPA berlangsung 12 kali putaran selama delapan tahun. Maka pada riset ini, penulis menggunakan jenis riset kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kata-kata tertulis, studi literatur, serta nantinya diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan (Sarwono, 2006). Dalam melakukan riset ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik riset pustaka. Disini penulis akan melihat dan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita, laporan yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis (Umar, 2012).

Dalam penulisan ini, data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer serta juga berasal dari sumber sekunder. Sumber primer yang akan menjadi data penulis adalah hasil-hasil laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau

instansi terkait dari negara Australia – Indonesia yang berkaitan dengan rumusan masalah riset ini. Data sekunder penulis berasal dari jurnal-jurnal, berita, serta data-data yang dikeluarkan oleh badan-badan yang meneliti IA-CEPA. Metode riset yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penulis (Lezi, 2011).

1.8.2 Proses Penelitian

Proses riset adalah menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan riset. Pentingnya prosedur ini adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Oleh karena itu, riset ini akan dilakukan melalui beberapa prosedur:

1. Pra Riset

Pra riset mencakup kegiatan persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait riset, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan riset.

2. Pengambilan Data

Riset ini akan mendapatkan data dari sumber sekunder. Sumber sekunder akan dipilih dari berbagai media tertulis, mencakup: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Australia - Indonesia dan publikasi, dan surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada reputasi kredibilitas media dan hubungannya dengan topik riset.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap penting berikutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari semua sumber.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data.

Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan wawancara dan dokumen terkait.



BAB II

INDONESIA SEBAGAI LINKER DALAM NEGOSIASI IA-CEPA

Dalam analisis *issue linkage*, Haas mengklasifikasikan peran aktor yang terlibat menjadi dua bagian, yakni *linker* dan *linkee* (Haas E. B., 1980, p. 371). Bab ini akan membahas peran Indonesia sebagai *linker*, tujuan yang ingin dicapai *linker*, isu kompensasi yang ingin ditawarkan *linker*, dan aspek *win* serta *loss* pihak *linker*.

II.1 Indonesia sebagai *Linker*

Dalam menempatkan pihak yang menjadi *Linker*, Haas menjelaskan bahwa pihak *Linker* adalah pihak yang memiliki *power* lebih besar dibandingkan *Linkee*. Dengan begitu hasil kesepakatan akan dipengaruhi oleh bagaimana pihak *Linker* mengarahkan persepsi *Linkee*. (Haas E. B., 1980, p. 372) Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menempatkan Indonesia sebagai *Linker* karena Indonesia memiliki banyak pilihan dalam mengarahkan negosiasi IA-CEPA dibandingkan Australia. Dalam hal ini, Konsep *Issue Linkage* yang diterapkan yakni *Fragmented Issue linkage*, yang mana *issue* IA-CEPA ini tidak dapat dilihat hanya sebagai *issue* tunggal saja, melainkan melihat *issue* lain yang berperan dalam hubungan bilateral kedua negara di Kawasan Asia-Pasifik.

Dalam menjelaskan Indonesia memiliki *power* yang lebih besar dibandingkan Australia, yang memiliki banyak pilihan dibandingkan Australia adalah sebagai berikut: Pertama, Indonesia pada tahun 2018 memiliki jumlah populasi keempat terbesar di dunia dengan jumlah 261 juta jiwa (BPS, 2018). Dengan jumlah populasi yang lebih banyak dibandingkan Australia yang hanya memiliki 25 juta jiwa (ABS, 2019), hal tersebut merupakan salah satu kekuatan

bagi Indonesia dalam menentukan hasil kesepakatan negosiasi IA-CEPA. Kedua, posisi Indonesia secara geopolitik lebih diuntungkan dibandingkan dengan Australia di Kawasan Asia Pasifik, karena Indonesia adalah negara yang berpeluang besar dalam mengancam keamanan nasional Australia (Jennings, 2018, p. 107). Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya Australia adalah pihak yang tidak diuntungkan dalam keadaan ini, sehingga menyebabkan Australia pada posisi di mana keputusan yang diambil berdasar pada tekanan yang dipengaruhi oleh lingkungan Kawasan Asia-Pasifik. Hass tidak menjelaskan secara lebih spesifik apa saja yang menjadi indikator dalam menentukan *Linker* dan *Linkee*. Guna memperkuat argumen penulis dalam menentukan Indonesia sebagai *Linker*, setidaknya penulis akan menggunakan dua pendekatan, yaitu *Structural Power* dan *Geopolitical Power*.

Pertama, Penulis akan menggunakan pendekatan *Structural power* menurut Susan Strange, adapun menurut Susan Strange suatu negara dapat memiliki power terhadap negara lain, apabila negara tersebut memiliki empat keunggulan struktur yang berkaitan yakni: Keamanan (*Security*), Produksi (*Production*), Finansial (*Financial*), dan Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*) (Susan, 2010, p. 34). Kedua, Penulis akan menggunakan pendekatan *geopolitical power* menurut Cohen, adapun menurut Cohen suatu negara memiliki *power* terhadap negara lain, apabila negara tersebut memiliki tiga keunggulan geopolitik yakni: *Geostrategis*, *Geopolitical Region*, dan *Nation State* (Cohen, 2015, p. 37).

Tabel 3 - Komparasi *Structural Power* Indonesia dan Australia

Struktur	Indonesia	Australia	Hasil Komparasi
Keamanan	400 ribu jiwa tentara aktif, Indonesia berada pada tingkat 16 militer terkuat dunia (Global Fire Power, 2019).	60 ribu jiwa tentara aktif, Australia berada pada peringkat 19 militer terkuat dunia (Global Fire Power, 2019).	Jumlah tentara Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Australia, hampir 8 kali lipat dari total tentara Australia.
Finansial	PDB perkapita Indonesia senilai 11.900 Dollar US, dengan total penduduk 261 Juta Jiwa (BPS, 2018).	PDB perkapita Australia 45.780 Dollar US, dengan total penduduk 25 juta jiwa (ABS, 2019).	PDB perkapita Australia memang lebih besar dibandingkan Indonesia, akan tetapi jika dilipatkan dengan total penduduknya Indonesia jauh lebih besar dengan nilai 3.213.000, sedangkan Australia hanya 1.114.500
Produksi	Nilai Ekspor Indonesia 168,810,042.93 Juta	Nilai ekspor Australia 230,163,207.20 juta	Australia lebih unggul dalam hal faktor produksi dibandingkan

	US\$ (WITS, 2017). Sedangkan untuk urutan Nilai Ekspor Indonesia berada pada peringkat 25 dunia.	US\$. Sedangkan untuk urutan Nilai Ekspor Australia berada pada peringkat 20 dunia.	dengan Indonesia.
Ilmu Pengetahuan	Indonesia memiliki Hak Paten perdagangan internasional sebanyak 54,827 (WIPO, 2017)	Australia memiliki hak paten perdagangan Internasional sebanyak 206,219 (WIPO, 2017)	Indonesia dalam faktor ilmu pengetahuan tertinggal oleh Australia, terlihat dalam daftar hak paten merek dagang Internasional.

Sumber: Hasil Analisis, 2019 diadopsi dari Susan Strange

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam hal struktur keamanan dan struktur finansial Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Australia, akan tetapi secara produksi dan ilmu pengetahuan Indonesia masih tertinggal dengan Australia.

Tabel 4 - Komparasi Geopolitical Power Indonesia dan Australia

Struktur	Indonesia	Australia	Hasil Komparasi
Geostrategic	Samudera Hinda dan Samudera Pasifik	Samudera Pasifik dan Laut Antartika	Secara geostrategic Indonesia berada pada posisi yang strategis dibandingkan Australia yang berada di ujung dunia bagian Selatan
Geopolitical Region	Kawasan Asia Tenggara, Asia	Kawasan Pasifik	Indonesia lebih unggul dalam keadaan geopolitik

	Timur,		region dibandingkan dengan Australia yang berada dalam Kawasan Pasifik
National State	Negara bangsa bagian Timur	Negara bangsa bagian barat	Australia jika dianalogikan dalam suatu Lingkungan Sosial, Australia merupakan pendatang di dunia bagian selatan, sedangkan Indonesia adalah tuan bagi negara bangsanya.

Sumber: Hasil Analisis, 2019 diadopsi dari Saul Bernard Cohen

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan geografi Indonesia lebih diuntungkan dibandingkan dengan keadaan geografi Australia. Dengan letak yang strategis Indonesia diuntungkan dalam berbagai aspek, baik itu keamanan, politik, budaya ataupun sosial.

Dengan melihat Tabel 2 dan 3 di atas penulis dapat menjelaskan bahwa menurut pendekatan Susan Strange Indonesia hanya unggul dalam dua bidang yakni Keamanan, dan Keuangan. Guna memperkuat keunggulan tersebut menurut pendekatan Cohen Indonesia lebih diunggulkan dalam hal *Geopolitical Power*. Jadi pada dasarnya pendekatan Susan Strange diperkuat oleh pendekatan Cohen guna mempertegas posisi Indonesia yang lebih diunggulkan daripada Australia dalam negosiasi IA-CEPA. Selain itu, menurut Aggarwal strategi yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional dalam negosiasi FTA dapat dilihat dari faktor kemitraan, geografi dan isu. Artinya, komparasi kekuatan

keamanan, finansial, dan kekuatan dikawasan dapat menjadi daya tawar bagi negara yang sedang melakukan negosiasi guna mencapai kepentingan nasionalnya. Seringkali dalam perjanjian perdagangan bilateral keamanan dan ekonomi merupakan acuan dalam menentukan kesepakatan negosiasi (Aggarwal, 2011). Dalam hal ini, penulis melihat bahwa Indonesia berada posisi tersebut. Sebagai Linker, Indonesia dapat lebih luas dalam mengarahkan persepsi Linkee dalam mencapai kesepakatan yang dicapai.

II. 2. Tujuan yang ingin dicapai Indonesia

Kerja sama dapat disatukan oleh komitmen untuk mencapai beberapa tujuan sosial utama, walaupun para aktor dalam keadaan ketidakpastian guna mencapai kerja sama tersebut (Haas E. B., 1980, p. 372). Dalam hal ini, Penulis menganalisis bahwa *goal* yang ingin dicapai oleh Indonesia adalah menyampingkan tujuan penyelesaian IA-CEPA dengan menggunakan pendekatan penyelesaian *issue* lain.

Seperti pada penjelasan Bab I bahwa negosiasi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan negosiasi CEPA lainnya. Indonesia ataupun Australia memiliki komitmen untuk menyelesaikan negosiasi ini hingga selesai, akan tetapi komitmen tersebut tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Terkhusus dalam pembahasan ini adalah Indonesia menginginkan negosiasi tersebut selesai, disisi lain ada *issue* yang tidak dapat dikesampingkan mengenai keberlanjutan negosiasi IA-CEPA tersebut. Dalam negosiasi ini Indonesia dalam pihak yang memiliki banyak opsi dalam menentukan penyelesaian negosiasi IA-CEPA. Dapat dilihat dalam rentang waktu 2013-2016 Indonesia memberhentikan sementara negosiasi IA-CEPA karena terkait dengan Issue Bilateral lain.

Dalam mempermudah penelitian ini, penulis membedakan tujuan ekonomi dan non-ekonomi, agar dapat lebih jelas guna memetakan kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua negara, khususnya dalam bagian ini akan melihat Indonesia dalam tujuan tersebut.

II. 2.1. Tujuan Ekonomi

Kepentingan Indonesia dalam hubungan perdagangan bilateral dengan Australia yang pertama yakni menekan defisit neraca perdagangan. Terlihat dalam beberapa tahun terakhir dari 2014 hingga 2019 Indonesia selalu mengalami defisit bahkan dari tahun ke tahun defisit tersebut terus meningkat. Dalam IA-CEPA ini Indonesia memanfaatkan momentum tersebut agar dapat mengatasi permasalahan neraca perdagangannya dengan Australia. Berikut penulis tampilkan tabel perdagangan Indonesia dengan Australia dari tahun 2014 hingga 2019:

Tabel 5 - Neraca Perdagangan Indonesia dan Australia Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Trend(%) 14-18	Jan-Agu		Perub.(%) 19/18
							2018	2019	
TOTAL PERDAGANGAN	10.595.876,1	8.518.102,1	8.469.772,8	8.533.310,8	8.645.167,3	-3,97	5.701.187,7	5.118.243,9	-10,22
NERACA PERDAGANGAN	-699.128,6	-1.113.487,0	-2.051.936,7	-3.484.587,6	3.005.915,7	50,05	-1.909.844,5	-2.066.899,3	-8,22
MIGAS	1.095.103,4	564.299,8	-193.455,8	-382.296,8	-8.099,6		26.499,5	-370.917,5	-1.499,71
NON MIGAS	1.794.232,0	-1.677.786,7	-1.858.480,9	-3.102.290,8	-2.997.816,1	17,84	-1.936.344,0	-1.695.981,9	12,41

Tabel 6 - Sektor Eskpor-Import Indonesia dan Australia Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Trend(%) 14-18	Jan-Agu		Perub.(%) 19/18
							2018	2019	
MIGAS	1.408.558,8	851.030,7	1.270.007,8	1.547.615,6	1.321.512,1	4,82	857.088,4	583.986,4	-31,86
NON MIGAS	9.187.317,3	7.667.071,4	7.199.765,0	6.985.695,3	7.323.655,2	5,32	4.844.099,3	4.534.257,5	-6,40
EKSPOR	4.948.373,7	3.702.307,6	3.208.918,0	2.524.361,6	2.819.625,8	-14,00	1.895.671,6	1.525.672,3	-19,52
MIGAS	1.251.831,1	707.665,2	538.276,0	582.659,4	656.706,2	-13,80	441.794,0	106.534,5	-75,89
NON MIGAS	3.696.542,7	2.994.642,3	2.670.642,1	1.941.702,2	2.162.919,6	-13,97	1.453.877,7	1.419.137,8	-2,39
IMPOR	5.647.502,4	4.815.794,5	5.260.854,8	6.008.949,2	5.825.541,5	2,87	3.805.516,1	3.592.571,6	-5,60
MIGAS	156.727,7	143.365,4	731.731,8	964.956,2	664.805,8	61,55	415.294,4	477.452,0	14,97
NON MIGAS	5.490.774,6	4.672.429,1	4.529.123,0	5.043.993,0	5.160.735,7	-0,47	3.390.221,7	3.115.119,7	-8,11

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Dengan melihat tabel tersebut, dari tahun 2014 hingga tahun 2019 total perdagangan Indonesia dan Australia menurun, tren tersebut diikuti dengan meningkatnya defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia. Tren penurunan nilai perdagangan tersebut pun tidak hanya terjadi dengan Australia, melainkan dengan dunia. Dalam hal ini Indonesia masih bergantung terhadap komoditas migas, karena migas selalu mengalami surplus. Bahkan migas berkontribusi dalam memperkecil defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap

Australia. Sedangkan impor Indonesia dari Australia lebih didominasi dari sektor pertanian dan peternakan, yang mana hal itu menyebabkan sektor non-migas Indonesia selalu mengalami defisit (Kementerian Perdagangan, 2016, p. 14).

Dalam hal ini, guna menekan defisit neraca perdagangan dengan Australia, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah strategis yang dimasukkan dalam kerangka kerja IA-CEPA. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit, di antaranya adalah: kebijakan tarif dan non-tarif. Dalam negosiasi bilateral PTA (Preferential Trade Agreement) sering diklaim dapat merampingkan hambatan bebas tarif ataupun non tariff, peningkatan nilai perdagangan dan restrukturisasi ekonomi ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, negara menggunakan PTA sebagai pengaruh politik domestik dalam membuka sektor yang tertutup, yang mana dari hal ini diharapkan dapat mengatasi sektor tradisional tertutup (Ravenhill J. , Regionalism, 2005).

Indonesia telah mendapatkan fasilitas bebas tarif dengan Australia pada kerja sama perdagangan bebas AANZFTA sebesar 97,6%. Dengan adanya negosiasi IA-CEPA, fasilitas bebas tarif tersebut menjadi 99.9%. Artinya Indonesia mendapatkan fasilitas bebas tarif dari Australia sebesar 0%. Melihat hal tersebut produk Indonesia mendapatkan fasilitas seluruh pos tarif bea masuk menjadi nol persen. Memanfaatkan hal tersebut pemerintah Indonesia telah menyiapkan produk utama yang akan mendorong ekspor yakni produk otomotif khususnya mobil listrik dan hibrid. Terkait dengan produk otomotif tersebut Indonesia mendapatkan fasilitas kualifikasi lokal konten yang tidak didapatkan oleh negara lain, hal tersebut semakin memudahkan persyaratan ekspor Indonesia ke Australia (Kemlu Indonesia, 2016).

Sedangkan dalam hal non-tarif memberikan dampak lebih besar terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia. Australia memiliki standar produk yang sangat tinggi dan berbeda jauh dengan Indonesia, dan hal itu yang menyebabkan hanya sebagian kecil saja produk Indonesia dapat menembus pasar Australia, terkhusus produk pangan (Kementerian Perdagangan, 2016). Guna mengatasi permasalahan non-tarif tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam kerangka kerja IA-CEPA yakni: NG-TIG (*Negotiating Group Trade in Goods*) yang mana dari program tersebut membentuk berbagai program yakni *Indonesia Food Innovation Center*, *Mutual Recognition on Food Standar*, *Herbal Products and Holticure* serta *TBT* dan *SPS*. Dengan berbagai program tersebut yang menjadi tujuan pencapaiannya adalah meningkatkan standar produk Indonesia dengan standar produk Australia, sehingga akan berdampak peningkatan ekspor Indonesia ke Australia (Kementerian Perdagangan, 2016).

Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa ekspor dan investasi merupakan modal dalam memperkuat perekonomian Indonesia di tengah persaingan global yang cukup ketat. Senada dengan hal tersebut peningkatan ekspor akan berdampak terhadap defisit neraca perdagangan dan investasi asing akan mendorong perekonomian Indonesia kedepannya (Syafina, 2018). Berdasarkan keterangan tersebut, dalam IA-CEPA pembahasan investasi adalah hal yang paling penting, Terkhusus bagi Indonesia yang sedang gencar mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Investor.id, 2015). Dengan melihat tren investasi tersebut, Investor asal Australia tidak menjadi salah satu yang mendominasi di Indonesia. Australia masih kalah jauh dengan Tiongkok, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Padahal Australia pada

saat ini termasuk dalam 20 negara yang melakukan “*outward investment*”. Hal itu pun di perkuat oleh kepala BKPM Franky Sibarani yang memberikan pernyataan sebagai berikut: “*Australia merupakan salah satu dari 20 negara maju yang melakukan 'outward Investment' terbesar, tetapi yang masuk ke Indonesia sedikit. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menempati urutan ketiga investasi dari Australia, di bawah Singapura dan Malaysia,*” (TEMPO.CO, 2016). Berikut data mengenai investasi Australia di Indonesia:



Tabel 7 - Komparasi Investasi Australia di Indonesia Tahun 2018-2019

No.	Negara	Investasi Tahun 2018	Negara	Investasi Tahun 2019
1.	Singapura	\$5 Miliar	Singapura	\$3.4 Miliar
2.	Jepang	\$2.4 Miliar	Jepang	\$2.4 Miliar
3.	Tiongkok	\$1.3 Miliar	Tiongkok	\$2.3 Miliar
4.	Korea Selatan	\$1.3 Miliar	Hong Kong	\$1.3 Miliar
5.	Hong Kong	\$1.1 Miliar	Malaysia	\$1 Miliar
6.	Malaysia	\$656.9 Juta	Belanda	\$738.5 Juta
7.	Amerika Serikat	\$646.1 Juta	Amerika Serikat	\$631.7 Juta
8.	British Virgin Islands	\$584 Juta	Korea Selatan	\$544.4 Juta
9.	Belanda	\$453.8 Juta	British Virgin Islands	\$385.4 Juta
10.	Australia	295.5 Juta	Thailand	\$262.2 Juta

Sumber: BKPM 2018-2019 Sem-1

Dengan melihat nilai invesasi Australia di Indonesia yang tidak begitu besar, maka dalam kerangka kerja IA-CEPA ini Indonesia melakukan upaya-upaya yang mendorong peningkatan investasi Australia di Indonesia. Hingga pada tahun 2019 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia hanya 400, angka tersebut masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pemerintah Indonesia melalui kerangka kerja IA-CEPA menjamin kepastian perekonomian Indonesia dan akses pasar yang lebih baik. Adapun yang menjadi prioritas Indonesia dalam mendorong investasi tersebut khususnya dalam bidang pendidikan tinggi dan vokasi, karena hal tersebut akan berdampak terhadap

peningkatan standar kualitas sumber daya manusia Indonesia (Kemlu Indonesia, 2016).

Dalam pembahasan negosiasi IA-CEPA, *Economic Powerhouse* merupakan poin persamaan kedua negara dalam kepentingan ekonomi. Baik Indonesia ataupun Australia sama-sama menginginkan menjadi bagian dari *value chain global*, yang mana tujuan dari hal ini adalah menjadi aktor yang berpengaruh di Kawasan. Konsep *Economic Powerhouse* ini akan menggabungkan keunggulan masing-masing negara yang mana hasil dari penggabungan tersebut akan di ekspor ke negara ketiga. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, salah satu contoh yang mudah diterapkan adalah sektor pangan, Australia merupakan negara dengan produksi gandum terbesar di dunia, sedangkan Indonesia kaya akan sumber tenaga kerja yang terampil dan murah. Kedua hal tersebut akan mendorong peningkatan produksi gandum menjadi produk siap ekspor, dengan asumsi menekan biaya produksi serta menghasilkan output harga yang dapat bersaing di kancan global (Kemlu Indonesia, 2016).

II. 2.2. Tujuan Non Ekonomi

Selain tujuan ekonomi yang komprehensif dan terkoordinir, perdagangan bebas dapat juga menjadi ruang menyelesaikan/mencegah suatu permasalahan yang tidak terikat dalam kerangka perjanjian (Jean Pierre Chauffour, 2010). Kaitannya dalam hal IA-CEPA, Indonesia merupakan aktor yang berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, baik ASEAN ataupun Asia Pasifik. Seperti contohnya: pembentukan Uni Eropa dalam mencegah Perang Eropa terjadi kembali ataupun pembentukan Mercosur atau APEC dalam menjaga stabilitas

kawasan (Bregsten, 1996) (Baldwin, 2008). Adapun yang dimaksud dalam stabilitas kawasan ini yakni kekuatan laut Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekuatan maritim terbesar di kawasan. Menurut Mahan, dalam mewujudkan kekuatan laut tersebut, setidaknya terdapat dua faktor. Pertama, ekonomi maritim yang meliputi produksi, jalur pengiriman dan koloni. Kedua, supremasi angkatan laut dalam menjamin kepentingan nasionalnya (Wu, 2018, p. 798).

Asia Tenggara dalam pusaran Asia Pasifik merupakan kunci dari perairan internasional, hal tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia (*geostrategic*) dalam menjaga stabilitas kawasan. Maka dari itu, dengan posisi yang sangat strategis, Indonesia melakukan pendekatan “keseimbangan kekuatan” agar tidak ada aktor tunggal yang menguasai kawasan tersebut. Dalam keterkaitannya dengan ekonomi maritim, Indonesia ingin memastikan bahwa tidak ada negara manapun yang memegang kendali Indonesia di kawasan Asia Pasifik, secara kekuatan maritim dengan apa yang maksud oleh Mahan bahwa Indonesia meliputi seluruh faktor tersebut (Wu, 2018).

Melihat keunggulan *geopolitical power* Indonesia di atas, khususnya dalam hal *geostrategic* laut Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional (Febrica, 2017). Australia membutuhkan Indonesia guna mengamankan jalur perairan internasional untuk menunjang perdagangan internasional Australia. Terdapat tiga jalur perairan Internasional yang dimiliki Indonesia saat ini. Ketiga jalur tersebut di bedakan menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 (Selat Sunda), ALKI 2 (Selat Lombok), ALKI 3 (Selat Ombai Wetar). Dari Ketiga ALKI tersebut berperan dalam menghubungkan antara, Samudera Hindia, Laut

China Selatan, Samudera Pasifik (Sinagal, 2011). Khususnya ketiga jalur tersebut berperan dalam menghubungkan alur perdagangan internasional Australia dengan negara Asia Timur (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan). Ketiga negara tersebut merupakan tiga negara tertinggi dalam perdagangan Australia, bahkan menyumbang hampir 45% total perdagangan Australia di dunia (Workman, 2019). Dengan melihat nilai perdagangan Australia yang sangat tinggi dengan negara Asia, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam potensi keamanan Australia.

Dalam hal lain, Indonesia memiliki peran dalam menentukan struktur sosial Australia di kawasan Asia-Pasifik. Walaupun Australia memiliki banyak relasi di negara Asia, hal tersebut tidak akan menjadi apabila Indonesia tidak memainkan peran didalamnya (Renshaw, 2018). Dengan banyaknya perselisihan yang terjadi antara kedua negara dan keadaan sosial yang berbeda jauh di antara keduanya, memaksa Indonesia untuk memantau Australia terkait pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Bagaimanapun juga Indonesia merupakan gerbang utama bagi Australia untuk masuk ke dalam pusran Asia, dan Indonesia hingga sampai saat ini memainkan peran tersebut dengan tetap mengontrol kelayakan Australia dapat masuk kedalam kawasan Asia.

Melalui IA-CEPA, peran Indonesia akan lebih kuat dalam mempengaruhi pendekatan Australia di kawasan Asia-Pasifik, dan akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Australia terhadap Asia. Dengan posisinya yang berada di tengah tengah kekuatan ekonomi global yakni Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia mempertegas posisinya dalam percaturan ekonomi politik internasional, Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa,

konfrontasi yang terjadi diantara dua kekuatan ekonomi global tidak akan ada yang diuntungkan. Walaupun terdapat yang menang atau yang kalah keduanya sama – sama dirugikan. Melalui pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia tidak ingin memilih salah satu pihak. (Menteri Luar Negeri Indonesia, 2019)

III. 3. Tawaran Linker

Fragmented Issue linkages memiliki tujuan untuk merealisasikan beberapa keuntungan bersama, meskipun keuntungan tersebut tidak jelas dalam pendistribusiannya. Ketidakjelasan tersebut adalah alasan dalam mengaitkan masalah. Maka dari itu linker menghubungkan masalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal meskipun mengaitkan masalah dengan cara yang tidak rasional (Haas E. B., 1980, p. 373). Kaitannya dengan hal ini Indonesia mempertahankan posisinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan beberapa strategi. Dapat dilihat, awalnya negosiasi ini diluncurkan pada tahun 2010 terdapat beberapa hubungan yang kurang harmonis antara kedua negara. Pada tahun 2011 Indonesia dan Australia memiliki permasalahan Ekspor-Impor terkait komoditas sapi. Australia mengklaim bahwa pemrosesan komoditas sapi di Indonesia tidak dilakukan berdasarkan standar yang memadai, bahkan pemerintah Australia memberhentikan sementara ekspor sapinya selama enam bulan (Detik.com, 2011). Dengan adanya kebijakan tersebut berpengaruh terhadap ketahanan pangan dalam negeri Indonesia (DW.com, 2011). Di lain pihak, Australia mengalami kerugian di sektor peternak, karena ekspor komoditas sapi Australia ke Indonesia menyumbang 20% dari total ekspor sapi Australia di dunia (Liputan6, 2013).

Permasalahan Ekspor-Impor komoditas sapi merupakan salah satu bagian dinamika yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Dalam *Issue* lain yakni penyadapan pemerintah Australia terhadap Indonesia. Kasus tersebut diketahui pada tahun 2013, yang mana dalam temuannya Australia menyadap Indonesia pada tahun 2007-2009. Penyadapan tingkat negara merupakan pelanggaran hak kedaulatan Indonesia oleh Australia, karena subjek yang dijadikan target dalam operasi ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, serta pejabat tinggi pemerintah Indonesia lainnya (BBC News, 2013). Dengan adanya permasalahan penyadapan tersebut semakin merenggankan hubungan kedua negara, bahkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik Duta Besarnya dari Canberra selama dua minggu. Pemerintah Indonesia memandang bahwa apabila negosiasi dilanjutkan dengan keadaan yang tidak harmonis, negosiasi tidak akan berjalan secara efektif (Tempo.co, 2013). Pada posisi ini Indonesia mempertegas kepada Australia bahwa negosiasi IA-CEPA tidak dapat dilanjutkan dan harus diberhentikan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, Australia harus merubah sikapnya terhadap Indonesia, jika ingin melanjutkan kembali negosiasi IA-CEPA (Waluyo, 2013).

Pemerintah Indonesia menawarkan pemberhentian negosiasi IA-CEPA guna memperbaiki hubungan kedua negara ke arah yang lebih harmonis. Di tengah situasi tersebut, hubungan bilateral kedua negara semakin tegang ketika Presiden Joko Widodo menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka kasus narkoba yang merupakan warga negara Australia (Liputan6, 2015). Pemerintah Australia telah melakukan berbagai upaya untuk membatalkan kebijakan tersebut, bahkan publik Australia melakukan aksi protes atas kebijakan Indonesia

menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara Australia. Upaya yang dilakukan oleh Australia tidak membuahkan hasil dan pada tahun 2015 Indonesia mengeksekusi kedua WNA tersebut (Detik.com, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas kedua negara mengalami hambatan dalam negosiasi IA-CEPA. Dengan hambatan tersebut semakin memperlambat kedua negara dalam menyelesaikan negosiasi. Dampak dari hubungan diplomatik dan politik kedua negara turut mempengaruhi negosiasi IA-CEPA yang berlangsung dalam waktu yang lama dibandingkan dengan negosiasi lainnya (Harvey, 2016)

Pada tahun 2016 wacana reaktivasi negosiasi IA-CEPA mulai dibicarakan. Berawal dari pertemuan tingkat pimpinan yakni Presiden Joko Widodo dan Malcolm Turnbull hingga pada pertemuan tingkat Menteri. Pada proses reaktivasi negosiasi IA-CEPA ini, pihak Australia adalah pihak yang sangat menginginkan negosiasi ini kembali dibicarakan. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa Australia harus menunjukkan iktikad harmonisasi hubungan bilateral kedua negara. Dapat dilihat dari pembukaan pembicaraan awal yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang diwakili oleh Malcolm Turnbull meminta kepada Joko Widodo untuk membuka kembali negosiasi IA-CEPA (Beritasatu, 2016). Pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan hubungan bilateral yang semakin membaik, maka memutuskan untuk reaktivasi negosiasi IA-CEPA yang dilakukan di Yogyakarta pada 6 Maret 2016 (Menteri Perdagangan, 2016).

Semenjak reaktivasi negosiasi IA-CEPA, negosiasi yang memakan waktu pada kali ini disebabkan oleh kerasnya kepentingan kedua negara. Terdapat beberapa pembahasan yang berakhir tanpa hasil, seperti pada pembahasan investasi yang memakan waktu lebih banyak di antara pembahasannya lainnya.

Dalam negosiasi IA-CEPA investasi di bidang pendidikan merupakan salah satu yang paling sering disorot dalam beberapa putaran negosiasi terakhir (Satchwell, Australia-Indonesia trade deal: Dealing with Great Expectations, 2017). Ada beberapa alasan di mana Indonesia memiliki UU yang berlaku bahwa investasi asing di bidang pendidikan hanya dapat dimiliki sebesar 49%, disisi lain Australia menginginkan saham investasi tersebut lebih dari 49% bahkan hingga 100%. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian negosiator Indonesia jika keinginan Australia tersebut disetujui (HARNAS, 2017). Berikut kealotan pembahasan mengenai investasi asing di bidang pendidikan: Pertama, tidak ada satu negara manapun yang diperbolehkan menanamkan investasi asing di bidang pendidikan dengan memiliki saham mayoritas bahkan 100%. Kedua, kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap standar Australia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, dapat mengancam industri dalam negeri. Ketiga, memaksimalkan peran investasi asing guna membangun sumber daya manusia yang kompeten.

Berdasarkan analisis di atas penulis dapat melihat gambaran bahwasanya Indonesia sedang mengantisipasi konflik yang lebih luas Australia di bidang pendidikan, dengan menekan mayoritas saham Australia melalui regulasi daftar investasi terbuka bersyarat di perguruan tinggi. Melalui kebijakan tersebut Indonesia dapat memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi Australia dalam melakukan transfer teknologi/ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia yang setara dengan negara-negara maju, sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam persaingan global.

Tujuan Indonesia dalam bidang pendidikan tercantum dalam UU no 12 tahun 2012, UU tersebut menjelaskan bahwa perguruan tinggi asing yang akan membuka perguruan tinggi di Indonesia memiliki syarat sebagai berikut: Pertama, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia. Kedua merekrut tenaga kerja pendidik Indonesia (kemenristek, 2012). Dalam penyelesaian negosiasi tentang bidang pendidikan Indonesia menggunakan pendekatan *negative list* (daftar negatif investasi) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016. Sektor pendidikan tercantum dalam huruf O tentang jasa pendidikan tinggi program gelar swasta dan non gelar swasta dengan status sebagai daftar investasi terbuka dengan persyaratan (BKPM, 2016).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia menawarkan kepada Australia saham investasi asing di bidang pendidikan sebesar 67% yang masuk dalam daftar investasi terbuka persyaratan (Gumelar, 2018). Selain dari perguruan tinggi asal Australia, terdapat bidang pendidikan dalam bentuk lain, dalam kesepakatan tercantum bahwa kerja sama dalam bidang vokasional, yakni program magang mahasiswa asal Indonesia di Australia (DFAT, 2019).

II. 4. Aspek Win Linker

Terdapat beberapa hal yang menentukan aspek *win* Indonesia, penulis mengklasifikasikan menjadi win ekonomi dan win non-ekonomi. Dalam hal ekonomi : Pertama, hal yang sangat jelas *win* dari Indonesia adalah Indonesia mendapatkan fasilitas bebas biaya bea masuk ke Australia sebanyak 99,9%, yang artinya hal tersebut akan mendorong peningkatan nilai perdagangan Indonesia

dengan Australia dan dalam jangka panjang akan menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Dalam hal non-ekonomi: kesepakatan terkait nilai saham yang dimiliki Australia senilai 67% dalam bidang pendidikan tinggi dan vokasi pendidikan menjadi legitimasi bagi Indonesia dalam mengontrol investasi Asing. Terlepas dari kepentingan Indonesia dalam peningkatan ekonomi, hal yang sangat jelas dalam menentukan Indonesia *Win* adalah pengaruh Indonesia di kawasan Asia-Pasifik, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan Australia dalam mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan. Indonesia akan menjadi pengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Australia di kawasan.

Selanjutnya Aspek *win* Indonesia dalam hal non-ekonomi adalah peningkatan sumber daya manusia. Terdapat beberapa program yang akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia, contohnya seperti pertukaran tenaga kerja ahli Indonesia dan Australia, program magang bagi warga negara Indonesia serta dibukanya universitas Australia di Indonesia akan berdampak terhadap peningkatan jangka pangjang SDM Indonesia.

Dengan berbagai kelebihan tersebut Indonesia seharusnya dapat memaksimalkan IA-CEPA, sebagai alat guna meningkatkan perekonomiannya, serta memaksimalkan peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik agar dapat bersaing di percaturan ekonomi politik internasional.

II. 5. Aspek Loss Linker

Dalam mencapai tujuan kepentingan Indonesia di IA-CEPA, Indonesia akan mengalami loss nya di lain sektor. Setidaknya terdapat beberapa aspek *loss* bagi Indonesia dalam negosiasi ini. Dalam hal ekonomi yang menentukan posisi

kekalahan Indonesia adalah bahwa mayoritas dari masyarakat Australia masih memandang Indonesia sebagai negara yang tidak baik. Berkaitan dengan investasi yang diharapkan tumbuh melalui kerangka kerja IA-CEPA ini, belum dapat dijamin bahwa investasi dari Australia akan tumbuh di Indonesia. Indonesia membutuhkan usaha yang lebih kuat agar IA-CEPA ini berdampak terhadap peningkatan perekonomian Indonesia dengan sesuai apa yang diekspektasikan (Millott, 2015). Kedua, Indonesia masih jauh dalam hal peningkatan standar produk ekspor, dalam hal ini jika pemerintah tidak dapat memanfaatkan kuota ekspor tersebut Indonesia akan mengalami kerugian. Perlu dipahami bahwa Australia memiliki kualitas kontrol produk ekspor yang sangat tinggi, dan hal tersebut salah satu yang menyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia.

Dalam sektor ilmu pengetahuan dan sektor produksi, Indonesia tidak lebih unggul daripada Australia, Australia dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Dengan keunggulan di bidang pendidikan akan mengancam industri pendidikan dalam negeri, yang masih jauh dari standar internasional. Dalam jangka panjang dampak tersebut akan terlihat nyata ketika pemerintah Indonesia tidak dapat menjamin peningkatan kualitas pendidikan dalam negerinya. Begitupun dengan sektor produksi, walaupun Indonesia memiliki tenaga ahli yang relatif murah di dunia internasional, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin akan meningkatkan produksi dalam negeri Indonesia. Bahkan sebaliknya tenaga kerja Indonesia memilih untuk bekerja di negara lain salah satunya Australia, guna mendapatkan jaminan kesejahteraan di

masa yang akan datang. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat menjamin kesejahteraan para aktor yang berpengaruh terhadap nilai produksi Indonesia.



BAB III

AUSTRALIA SEBAGAI LINKEE DALAM NEGOSIASI IA-CEPA

Setelah analisis dari sudut pandang *Linker* (Indonesia) pada Bab II, Bab ini akan menganalisis dari sudut pandang *Linkee* (Australia), yang mencakup posisi Australia sebagai *Linkee*, tujuan yang ingin dicapai, alasan Australia menerima hubungan (*linking*) dari Indonesia serta aspek *win* dan *loss* Australia.

III.1. Australia sebagai Linkee

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Haas, *Linkee* memainkan peranan yang cukup penting untuk menentukan kesepakatan kerja sama dalam konsep *Issue Linkage*. Terjalin atau tidaknya suatu hubungan kerja sama dalam konteks *Issue Linkage* tergantung persepsi *Linkee* dalam menerima tawaran dari *Linker* (Haas, 1980, hal. 373). Merujuk pada Tabel 2 dan 3 - Komparasi *Structural Power* dan *Geopolitical Power* Indonesia dan Australia. Australia memiliki kekuasaan struktural dan geopolitik yang cenderung lebih lemah dibanding Indonesia, yang menyebabkan Australia berperan sebagai *Linkee* dan memegang kendali untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak tawaran dari Indonesia.

Alasan utama penulis menempatkan Australia sebagai *Linkee* dalam negosiasi IA-CEPA, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara ekonomi keenam terbesar di dunia pada tahun 2030, sedangkan Australia dibawah Indonesia (Treasury, 2015). Berikut gambar proyeksi ekonomi Indonesia dan Australia pada tahun 2030:

Gambar 2 - Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2030



Sumber: Treasury (Australian projections consistent with the 2015 Intergenerational)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Tiongkok diproyeksikan akan menjadi pemimpin dalam perekonomian dunia dengan nilai \$42.4t, disusul Amerika Serikat \$24.0t, Uni Eropa 23.3t, India \$20.9t, Jepang \$5.9t dan Indonesia \$5.5t unggul jauh dibanding Australia yang hanya \$1.7t. Dalam hal lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan dalam mengancam posisi Australia di kawasan Asia-Pasifik (Rory Medcalf, 2014). Dengan melihat hal tersebut Australia dihadapkan pada posisi yang mengharuskan terlibat dalam peningkatan perekonomian Indonesia, di sisi lain Australia dapat memanfaatkan peningkatan Indonesia dalam menjaga kepentingan nasionalnya.

Gambar 3 - Peta Indonesia dan Australia di Kawasan Asia



Sumber: Maps.com 2019

Berdasarkan dari tata letak geografi di atas, penulis melihat gambaran bahwa posisi geografi Australia bersebelahan dengan Indonesia hanya dipisahkan oleh Samudera Hindia, dan dari keseluruhan lingkup geografi yang berada dekat di sekitarnya mayoritas memiliki sistem politik, sosial, dan budaya yang berbeda.

Indonesia telah mengalami reformasi sistem pemerintahan, yang dikenal dengan sistem orde baru beralih menjadi sistem reformasi (demokrasi). Dengan perubahan tersebut berdampak terhadap politik internasional Indonesia. Sebagai salah satu contoh dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, Indonesia menjadi salah satu prioritas Australia dalam kebijakan luar negerinya, hal tersebut tercantum dalam White Paper 2013 and White Paper 2017 (Australian Government, 2012) (Australian Government, 2017, p. 41). Berubahnya kebijakan politik luar negeri Australia yang memprioritaskan Indonesia di dalam kawasan

Asia Pasifik terkhusus dengan kebangkitan Abad Asia, merupakan ancaman nyata yang akan dihadapi oleh Australia di masa yang akan datang. Dengan berubahnya haluan tersebut menempatkan Australia sebagai penyeimbang kekuasaan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik serta menjamin kekuasaan Amerika Serikat di Asia (Australian Government, 2012).

Hal lain yang menjadi keterpaksaan Australia adalah ketika keadaan politik ekonomi global yang semakin memanas dengan meningkatnya Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik menjadi penantang baru dalam tatanan dunia global memberikan ancaman posisi Amerika Serikat di Asia. Hal tersebut berpengaruh terhadap posisi Australia yang berada dalam lingkaran Asia Pasifik. Ketidakberuntungan tersebut dapat dilihat ketika posisi Indonesia yang sangat strategis dengan keadaan di mana posisinya berada di antara Tiongkok dan Australia, dengan keadaan tersebut Indonesia sangat berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap Australia dalam berbagai aspek baik itu ekonomi, politik ataupun keamanan. Sehingga dengan semua hal tersebut berdampak terhadap posisi Australia dalam tekanan di Kawasan Asia Pasifik ketika Indonesia berada dalam keadaan tidak memihak terkait politik luar negerinya (Australian Government, 2012).

Salah satu tujuan Australia dalam mengarahkan kebijakan politik luar negerinya ke Asia adalah untuk memantau posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik. Kaitannya dengan IA-CEPA adalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut, pada posisi seperti ini Australia sedang dalam potensi ancaman kekuatan Tiongkok serta tuntutan loyalitasnya terhadap mitra tradisionalnya Amerika Serikat (Korybko, 2017).

III.2. Tujuan yang ingin dicapai Australia

Seperti halnya dengan Indonesia, Australia juga mempunyai tujuan khususnya dalam penyelesaian negosiasi IA-CEPA ini. Tujuan ini bisa jadi sama atau justru berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, tujuan suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lain adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Fukuyama, 1989, pp. 3-18)

Sementara itu, Daniel S. Papp memaparkan bahwa kepentingan nasional terdiri atas beberapa aspek yaitu ekonomi, ideologi, keamanan dan militer (Papp, 2001, pp. 30-31). Tujuan Australia sebagai pihak *linkee* dalam kasus ini dapat dianalisis berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam penyelesaian kasus. Pada Bab II telah dibahas bahwa tujuan yang ingin dicapai Indonesia ada dua yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dengan Australia agar devisa negara berkurang dengan cara memproteksi saham pendidikan Australia di Indonesia menjadi 67% serta mendapatkan fasilitas ekspor sebesar 99.9% produk Indonesia dapat masuk secara bebas ke Australia. Adapun tujuan non-ekonominya mengenai hal keamanan dan politik di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam upaya harmonisasi hubungan Indonesia-Australia, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Australia terlihat dari beberapa kunjungan yang dilakukan. Pada tahun 2015 Perdana Menteri Malcolm Turnbull melakukan kunjungan pertamanya sejak pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014 dengan Joko Widodo, salah satunya meminta untuk melakukan reaktivasi negosiasi IA-CEPA yang sempat terhenti selama 2 tahun. Kunjungan Perdana Menteri dilanjutkan dengan pembicaraan antara Menteri di Canberra, dengan

mengumumkan kembali Re-Aktivasi negosiasi IA-CEPA. Putaran ketiga negosiasi IA-CEPA menjadi awal dari negosiasi yang sempat terhenti tersebut (Kemlu Indonesia, 2016). Seperti pada bab sebelumnya, penulis juga membedakan tujuan Australia menjadi dua bagian yaitu tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan ekonomi Australia ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh Australia dalam rangka mendapat keuntungan pada sektor ekonomi maupun non ekonomi dalam penyelesaian negosiasi ini.

III.2.1 Tujuan Ekonomi

Dalam kerangka kerja sama IA-CEPA yang menjadi fokus utama kedua negara adalah ekonomi, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan kepentingan non-ekonomi menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan. IA-CEPA memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap masa depan hubungan bilateral Indonesia-Australia, melalui hal itu kedua negara memastikan kerangka kerja ini dapat menguntungkan kedua belah pihak (Satchwell, Australia-Indonesia trade deal: Dealing with Great Expectations, 2017).

Pada tahun 2016 perundingan negosiasi IA-CEPA yang mengatur tentang investasi pendidikan, kesehatan dan pertanian di kedua belah pihak mengalami kebuntuan dalam negosiasi tersebut, yang pada kenyataannya perundingan yang mengatur hal tersebut selesai pada tahun 2018. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukito Australia menginginkan investasi dengan jumlah saham yang lebih besar, akan tetapi hal sulit untuk diimplementasikan di Indonesia, yang menerapkan kebijakan melindungi industri dalam negerinya. Dalam keterangan tersebut dapat dipahami, bahwa Australia menginginkan

kepastian investasi luar negerinya memberikan dampak positif bagi perekonomian Australia (Prihatini, 2017).

Perlu dipahami bahwa Australia sejauh ini hanya berinvestasi di Indonesia sebesar \$10.7 billion (DFAT, 2018) jika dibandingkan dengan Selandia Baru dengan populasi penduduk tidak mencapai 5 juta jiwa mendapatkan investasi asing sebesar \$96.7 billion (DFAT, 2018) dari Australia dibandingkan dengan Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bahwa investasi asing dari Australia lebih sensitif dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat karena ketidakpastian kebijakan dalam negeri Indonesia yang tidak stabil dalam menjamin para investor Asing di dalam negeri. Dengan keadaan tersebut perusahaan Australia tidak menginginkan risiko yang lebih besar jika suatu saat ketidakpastian itu akan terjadi tanpa dugaan, dapat dilihat bahwa perusahaan Australia masih khawatir untuk melakukan investasi di Indonesia (Krisiandi, 2017).

Alasan lain ketika pemerintah Australia menjalin kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Indonesia adalah tantangan bagi pemerintah Australia dalam meyakinkan para pengusaha bahwa investasi di Indonesia dapat memberikan keuntungan. Masyarakat Australia tidak yakin dengan pemerintah Indonesia yang telah melakukan pergeseran menuju negara yang demokratis, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang tidak dapat menjamin warga negara asing di dalam negerinya (Millott, 2015). Ketakutan tersebut tercermin dalam upaya pemerintah Australia yang utama adalah ketika ingin meyakinkan publik bahwa Indonesia telah berubah tidak seperti dulu lagi. Jadi dapat dilihat,

bahwa sudut pandang pemerintah Australia tidak mendapatkan dukungan penuh dari publik. Dengan keadaan seperti itu, sebenarnya pemerintah harus bekerja lebih ekstra dalam menjamin, bahwa Australia akan menanamkan saham investasinya di Indonesia (Krisiandi, 2017).

Sebenarnya *economic powerhouse* menjadi tujuan bersama antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam kesepakatan IA-CEPA ini. Lebih lanjut pada pembahasan ini akan mengambil sudut pandang Australia sebagai pihak *Linkee*. Dengan melihat manfaat yang akan berdampak terhadap Australia apabila *Economic Powerhouse* tersebut terealisasi.

Kelas menengah Indonesia yang mengalami peningkatan cukup besar terkhusus dengan peningkatan daya beli Masyarakat dan hal tersebut akan terus meningkat dalam jangka waktu yang cukup lama, merupakan salah satu prioritas Australia dalam memanfaatkan akses pasar yang sehingga hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian Australia. Dalam kesepakatan negosiasi IA-CEPA ini, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam mencapai *economic powerhouse* ini. Walaupun Indonesia telah menerima jaminan 99,9% bebas bea masuk untuk produk dari Indonesia, akan tetapi hal tersebut akan dilihat dari evaluasi dalam jangka waktu yang bertahap. Sedangkan dari pihak Indonesia memberikan beberapa keringanan kepada Australia dalam beberapa sektor investasi, sehingga hal ini akan berdampak terhadap perekonomian kedua negara dalam jangka waktu yang cukup panjang.

III.2.2 Tujuan Non Ekonomi

Hubungan bilateral antara Indonesia dalam masa sekarang hingga masa yang akan datang telah mengalami pergeseran yang cukup besar. Dapat dilihat dari pernyataan *Telstra Submission* pada tahun 2013 memberikan pernyataan:

“Indonesia is critically important to Australia. Its growing economy and population also make it a natural geopolitical leader within Southeast Asia.”

Dapat dijelaskan dalam pernyataan tersebut bahwa pada masa yang akan datang Indonesia merupakan kekuatan dari Asia Tenggara yang tidak dapat dikesampingkan perannya dalam ekonomi politik Internasional di Kawasan Asia Pasifik. Secara geopolitik Indonesia memiliki peran lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya untuk prospek mitra kerja sama Australia (Telstra Corporation, 2016).

Selain kepentingan ekonomi, kepentingan non-ekonomi Australia turut menjadi sorotan dalam IA-CEPA ini, khususnya dalam Kawasan Asia Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi menjadi ancaman di masa yang akan datang, ketika kekhawatiran itu terjadi maka Australia merupakan negara pertama yang akan mendapatkan ancaman tersebut. Maka dari itu melalui kerangka kerja IA-CEPA ini, Australia akan memastikan bahwa kemajuan Indonesia akan dibersamai dengan Australia guna menjaga stabilitas Kawasan Asia Pasifik dalam menjaga perdamaian dan pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Pada tahun 2013 Australia memasukkan Indonesia dalam *Australian in the Asian Century White Paper*. Kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki kepentingan nasional Australia dalam berbagai aspek, tak terkecuali Aspek Ekonomi. Pertama, Indonesia merupakan negara di mana serangan udara, darat, dan laut akan tercipta. Kedua terlepas dari hubungan bilateral kedua negara yang

mengalami pasang surut, Indonesia merupakan penyangga perdagangan Internasional Australia dengan melihat jalur perairan internasional. Ketiga, Indonesia merupakan negara penyangga keamanan dan stabilitas Kawasan di Asia Pasifik (Defence Australia, 2013).

Australia meluncurkan kembali Indonesia kedalam White Paper 2017 merupakan suatu upaya langkah strategis Australia dalam menjaga stabilitas Kawasan Asia-Pasifik (Australian Government, 2017). Hal tersebut pun diperkuat dengan isi dalam defence white paper 2013 yang menyatakan bahwa:

With growing influence and capability, Indonesia has an opportunity to play an increasing role in building regional and global stability, as it is already doing through its leading role in ASEAN and its membership of the East Asia Summit, Asia-Pacific Economic Cooperation forum and the G20. Indonesia's evolution as an increasingly influential democratic regional power and emerging global influence has seen its importance to Australia as a key security partner grow from an already strong base. This will continue over coming years and decades.

Dengan melihat pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun hubungan Indonesia dan Australia dalam keadaan harmonis ataupun tidak, Australia akan tetap menjaga hubungan bilateralnya sebaik mungkin dengan Indonesia, sehingga hal tersebut tidak menjadi kenyataan seperti yang diprediksikan (Defence Australia, 2013).

Jika dilihat dalam sudut pandang perdagangan Internasional, Australia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya selain Indonesia. Di antaranya Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam dan Singapura, ketujuh negara tersebut bahkan masuk dalam top 10 negara dengan prioritas perdagangan internasionalnya. Artinya, pada

dasarnya Australia merupakan aktor penting dalam perdagangan internasional di Kawasan Asia-Pasifik,

Dengan melihat penjelasan di atas, dalam negosiasi IA-CEPA ini penulis berargumen bahwa negosiasi IA-CEPA ini bukan hanya membicarakan negosiasi ekonomi yang lebih jauh mengenai *economic powerhouse*, lebih dari itu Australia menginginkan diantaranya. Pertama, pengakuan dari seluruh negara Asia Pasifik bahwa Australia merupakan aktor penting di kawasan. Kedua, bagaimanapun keadaan hubungan Australia dan Indonesia itu tidak menjadi persoalan, yang jauh lebih penting Indonesia merupakan prioritas stabilitas keamanan dalam Kawasan Asia Pasifik. Dengan argumen tersebut, penulis melihat bahwa negosiasi IA-CEPA ini merupakan sebuah alat bagi Australia dalam mengontrol stabilitas Kawasan Asia Pasifik (Telstra Corporation, 2016).

Menegaskan kembali bahwa IA-CEPA ini bukan hanya sebagai perjanjian ekonomi semata. Dengan melihat National Interest Analysis no. 37 mengenai *Support Strategic Partnership* yang menjelaskan bahwa:

Indonesia is one of Australia's most important bilateral relationships. Cooperation spans political, economic, security, development, education and people to people ties. Australia and Indonesia share joint interests in supporting economic growth, safeguarding our open sea-lanes, cooperating to fight terrorism and deter transnational crime, working together to bolster a rules-based international order and celebrating both countries' diversity by building deeper community understanding of each other's societies, languages and cultures. Australia's relationship with Indonesia is central to achieving the goals set out in the 2017 Foreign Policy White Paper. The White Paper notes that Indonesia is likely to be one of the five biggest economies in the world in purchasing power parity terms by 2030, and it is already a leader in our region, including in ASEAN.

Sources: National Interest analysis

Dalam keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan geografis Indonesia menjadi prioritas utama dalam hal keamanan di Kawasan Asia-Pasifik terutama posisinya sebagai leader di kawasan, dan *White Papper* 2017

menjelaskan Indonesia akan menjadi lima besar perekonomian dunia pada tahun 2030 (Australian Government, 2019).

Dengan melihat posisi Indonesia yang strategis di Kawasan Asia-Pasifik akan berdampak terhadap pengaruh keadaan Australia di Kawasan. Sehingga tujuan-tujuan non ekonomi ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam negosiasi IA-CEPA, dari banyaknya keputusan ekonomi yang terjadi. *Issue linkage* melihat bahwa IA-CEPA ini akan menentukan bagaimana nasib Australia kedepannya di kawasan.

III.3. Aspek Win Pihak Linkee

Dengan bangkitnya Abad Asia dan kondisi politik Indonesia yang belum sepenuhnya stabil, Australia memanfaatkan negosiasi IA-CEPA lebih besar guna mencapai kepentingan nasional, khususnya dalam menentukan posisinya di kawasan Asia Pasifik. Australia telah menjadi aktor penting di kawasan ini dengan melihat perannya di kawasan Asia Pasifik. Setidaknya ada beberapa aspek yang akan menentukan *Win* Australia dalam negosiasi ini. Penulis mengklasifikasikan aspek *win* Australia menjadi dua bagian, pertama bagian *win* ekonomi dan *win* non – ekonomi. Dalam bagian *win* ekonomi Pertama, Australia merupakan akses pasar bagi Indonesia dalam memperlebar perdagangannya di dunia internasional dengan negara-negara barat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Australia untuk dijadikan sebagai posisi tawar dalam negosiasi ini, yang tercantum dalam konsep *Economic Powerhouse*.

Kedua, terlepas dari persoalan non-ekonomi, Australia mendapatkan hak khusus untuk membuka universitasnya di Indonesia. Dengan hak tersebut Australia dapat memanfaatkan jumlah populasi sebanyak 270 juta untuk

memaksimalkan keuntungan ekonomi. Khususnya dalam sektor pendidikan Australia lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Dapat dilihat Universitas Australia masuk kedalam 100 top global, yakni Australian National University mendapatkan peringkat 20 di dunia (Idntimes, 2018), sedangkan Indonesia hanya berada pada peringkat 200 keatas, yakni Universitas Indonesia berada pada peringkat 292 dunia (Ruangguru, 2019). Berdasarkan perbandingan kedua universitas terbaik di masing-masing negara, Indonesia terlampau jauh dengan Australia..

Ketiga, dalam bagian *win* non-ekonomi terlepas dari hal potensi ancaman tenaga kerja local Australia. Australia dapat memanfaatkan IA-CEPA ini dalam menunjang produksi dalam negerinya. Seperti halnya penyerapan tenaga kerja ahli Indonesia yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja lokal Australia. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan industri dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negerinya.

Dengan berbagai hal diatas dapat dilihat bahwa Australia sebagai aktor yang memiliki keuntungan lebih banyak dalam negosiasi IA-CEPA ini, karena Australia membutuhkan Indonesia sebagai alat dalam menjamin kepentingan nasional Australia di kawasan. Disisi lain, Australia dapat memanfaatkan peningkatan konsumtif Indonesia yang semakin meningkat.

III.4. Aspek Loss Pihak Linkee

Berdasarkan penjelasan aspek *win* di atas, Australia memiliki aspek *loss* tersendiri. Pertama, disepakatinya bebas tarif ekspor Indonesia ke Australia sebesar 99.9%, berpotensi meningkatkan impor Indonesia ke Australia. Dengan meningkatnya impor tersebut, produk Indonesia akan memenuhi Australia. Dari

hal tersebut akan berpengaruh terhadap surplus neraca perdagangan Australia. Adapun sektor yang akan berpotensi memenuhi Australia adalah sebagai berikut: pertama sektor otomotif meliputi mobil, sepeda motor, dan produk otomotif yang mendapatkan perubahan tarif sebanyak 35% . Kedua, tekstil dan produk tekstil yang mendapatkan fasilitas penurunan 0% dari sebelumnya 5%., ketiga produk hebisida dan pestisida yang mendapatkan fasilitas penurunan sebesar 0% yang sebelumnya 5% dan lain – lain meliputi elektronik, permesinan, karet dan turunannya yang mendapatkan fasilitas penurunan sebesar 0% dari sebelumnya 5% (Ditjenppi Kemendag, 2018).

Kedua, Australia memiliki beberapa kerja sama perdagangan bebas dengan negara Asia Tenggara, diantaranya AANZFTA, SAFTA, TAFTA, dan MAFTA (DFAT, 2019). Dengan banyaknya perjanjian perdagangan antara Australia dan negara Asia Tenggara akan berdampak terhadap prioritas Australia terhadap mitra dagang Asia Tenggara. Di satu sisi Australia memiliki jejaring yang lebih luas di Asia Tenggara, di sisi lain akan membuat peta perdagangan Australia semakin kompleks, yang mana dari hal tersebut mempertanyakan prioritas IA-CEPA berada dimana?.

Ketiga, Hal lain yang tidak kalah penting yakni aspek *loss* non-ekonomi Australia. Indonesia mendapatkan fasilitas peningkatan WHV (Work Holiday Visa), sebelum IA-CEPA WHV mendapatkan fasilitas 1000 per tahun menjadi 4100 per tahun dan akan mengalami peningkatan sebesar 5% per tahun sampai dengan 5000 visa. Selain WHV, Indonesia akan mendapatkan program magang selama enam bulan sebanyak 200 orang per tahun (Ditjenppi Kemendag, 2018). Dengan semakin banyaknya fasilitas yang diberikan terhadap Indonesia, maka

akan menimbulkan potensi ancaman keamanan domestik Australia. Ancaman tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti contohnya: terorisme, penyelundupan manusia, dan lain sebagainya.

Keempat, terkait pendidikan tinggi di atas telah dijelaskan win Australia dalam hal ekonomi, di sisi lain terdapat potensi ancaman dalam negeri terhadap universitas Australia. Melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi, Bom Bali 2002 mayoritas korban berasal dari Australia, pengeboman hotel JW Marriott pengeboman Kedubes Australia di Indonesia, dan potensi ancaman lainnya yang akan berdampak terhadap keberadaan universitas Australia di Indonesia.

Kelima, potensi keuntungan ekonomi Australia lebih besar di bandingkan dengan Indonesia. Salah satu contohnya adalah perbandingan pembukaan bebas bea-tarif ekspor Australia ke Indonesia. Indonesia hanya mendapatkan fasilitas sebanyak 6.474 pos tarif sedangkan Australia mendapatkan fasilitas 10.813 pos tarif. (CNBCIndonesia, 2019). Dengan kemungkinan tersebut, secara non-ekonomi Australia akan terikat dengan pendekatan yang lebih intensif terhadap Indonesia secara komprehensif.

Dengan melihat aspek *win*, Australia pun memiliki aspek *loss* tersendiri. Melihat posisinya di kawasan Asia-Pasifik, terlihat seperti Australia yang membutuhkan negosiasi ini diselesaikan. Australia tidak memiliki pilihan lain, selain mempercepat pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik dalam memanfaatkan peningkatan ekonomi yang sangat cepat dalam dua dekade terakhir ini. Pertama, Australia membutuhkan Indonesia dalam IA-CEPA ini guna menjamin stabilitas kawasan Asia-Pasifik agar tetap berada pada pengawasan Australia. Dengan semakin berpengaruhnya Australia di kawasan Asia-Pasifik akan menjamin

kepentingan Australia terlindungi. Peran ini dimainkan oleh Indonesia dalam negosiasi IA-CEPA, dengan tidak terlalu terburu-buru agar tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan.



BAB IV

KESIMPULAN

IV. 1. Kesimpulan

Negosiasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah diwacanakan sejak tahun 2005 melalui beberapa tahap *Joint Feasibility* dan *Joint Study* dengan melihat kelayakan kedua negara dalam melakukan negosiasi perjanjian ini. Setelah melalui beberapa tahap tersebut, secara resmi pada tahun 2010 diperkenalkan kepada publik serta dilakukan putaran pertama. Pada tahun 2013 putaran ketiga negosiasi ini sempat terhenti dengan alasan hubungan bilateral yang kurang harmonis, dan kedua negara sepakat untuk reaktivasi negosiasi pada tahun 2016 ketika hubungan negara kembali membaik. Setelah reaktivasi pada tahun 2016 kedua negara sangat intensif dalam membahas penyelesaian negosiasi IA-CEPA, akan tetapi negosiasi tersebut baru dapat disepakati secara teknis pada maret 2019. Terhitung sejak peluncuran hingga penyelesaian memakan waktu selama sembilan tahun dengan melakukan duabelas kali putaran.

Dibandingkan dengan negosiasi CEPA lainnya, Indonesia ataupun Australia memakan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya CEPA Indonesia dengan Jepang menghabiskan waktu selama 5 tahun, atau Indonesia dengan Korea yang menghabiskan waktu selama 5 tahun. Sedangkan Australia menghabiskan waktu hanya 2 tahun dengan Singapura, dan dengan Malaysia hanya 3 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, negosiasi IA-CEPA ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas dibandingkan negosiasi CEPA lainnya. Dalam penelitian

ini penulis telah menjelaskan mengapa negosiasi IA-CEPA memakan waktu yang cukup lama di bandingkan dengan negosiasi lainnya.

Tabel 8 - Analisis Penerapan Issue Linkage

No.	Variabel	Linker (Indonesia)	Linkee (Australia)
1.	Tujuan Ekonomi	<p>1. Melalui kerangka kerja IA-CEPA, Indonesia memanfaatkan momentum untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Australia.</p> <p>2. Meningkatkan investasi asing dari Australia yang termasuk ke dalam 20 negara “<i>outward investment</i>”.</p>	<p>1. Australia memanfaatkan peluang dari kebangkitan abad Asia dalam mencapai kepentingan nasionalnya di bidang ekonomi.</p>
2.	Tujuan Non-ekonomi	<p>1. Menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik, dengan memantau pengaruh Australia di kawasan agar terjadi keseimbangan kekuatan di tengah kekuatan global.</p> <p>2. Sebagai penghubung Australia dengan Asia.</p>	<p>1. Australia melakukan pendekatan terhadap Indonesia, guna menjaga kepentingan Australia di kawasan Asia.</p> <p>2. Mengantisipasi ancaman keamanan terdekat dari Indonesia.</p>
3.	Aspek Win	<p>1. Indonesia mendapatkan fasilitas bea ekspor dari Australia sebanyak 0%.</p> <p>2. Peningkatan standar tenaga kerja Indonesia melalui program magang dan penambahan kuota.</p>	<p>1. Australia mendapatkan fasilitas investasi asing dibidang pendidikan sebesar 67%, yang mana hanya Australia yang mendapatkan fasilitas tersebut.</p>

		visa kerja.	
4.	Aspek Loss	<p>1. Industri pendidikan dalam negeri akan terancam dengan dibukanya fasilitas kepemilikan asing terkait pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 67%.</p> <p>2. Warga Australia masih memandang bahwa Indonesia belum dapat menjamin keamanan warga negara Australia, khususnya terhadap perusahaan Australia di Indonesia. dalam hal ini jaminan investasi dari Australia, cukup sulit untuk direalisasikan.</p>	<p>1. Australia membuka fasilitas ekspor bagi Indonesia sebesar 0%, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Australia-Indonesia dalam jangka panjang.</p> <p>2. Stabilitas keamanan Indonesia belum sepenuhnya stabil, khususnya melihat insiden tiga kali pengeboman yang ditujukan kepada Australia, memberikan kekhawatiran terhadap keamanan investasi Australia di Indonesia.</p> <p>3. Fasilitas visa kerja, akan berdampak terhadap keamanan nasional Australia, khususnya terhadap lapangan pekerjaan bagi warga lokal Australia.</p>

Dalam menguraikan penjelasan penelitian, penulis menjelaskan terlebih dahulu latar belakang negosiasi ini mengalami waktu yang cukup lama serta dinamika yang terjadi dalam setiap putaran. Guna penelitian ini lebih maksimal, penulis menggunakan konsep Issue Linkage menurut Ernest B. Haas. Issue Linkage melihat bahwa dalam suatu penyelesaian negosiasi, aktor yang berperan

didalamnya tidak hanya dilihat berdasarkan issue tunggal saja, melainkan melihat isu lain yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian. Adapun dalam konteks aktor, Haas mengklasifikasikan hal tersebut menjadi *Linker* dan *Linkee*. Linker adalah aktor yang memiliki peran lebih besar dalam mengarahkan persepsi Linkee, sedangkan Linkee merupakan aktor yang memutuskan arahan yang diberikan oleh Linker.

Dengan begitu, pada Bab II penulis menjelaskan analisis dalam perspektif Indonesia sebagai Linker. Pengklasifikasian Indonesia sebagai Linker berdasarkan dua pendekatan, yakni *Struktural Power* dan *Geopolitical Power*. Berdasarkan dari dua pendekatan tersebut, Indonesia memiliki peran yang lebih besar dalam mengarahkan persepsi Linkee. Guna mengarahkan persepsi Linkee, setidaknya Linker memiliki dua tujuan yaitu tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia di kancan global, dengan melakukan upaya peningkatan nilai produksi, meningkatkan ekspor, serta mengundang investor Australia untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sedangkan, tujuan non-ekonomi yang dicapai oleh Indonesia yakni untuk menjaga stabilitas Kawasan Asia-Pasifik dalam pengaruh Australia, serta mengambil peran sebagai penunjang hubungan Australia dengan Asia.

Setelah penguraian dari sudut pandang Linker, dalam Bab III penulis menjelaskan dari sudut pandang Australia sebagai Linkee. Australia berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam negosiasi IA-CEPA ini, karena Australia tidak memiliki pilihan lain dalam mengarahkan negosiasi IA-CEPA. Terlihat dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia, yang hanya berharap

kepada Indonesia agar negosiasi ini secepatnya diselesaikan. Kendati demikian, peran Linkee dalam negosiasi ini cukup penting, karena Linkee akan menentukan sikap yang diambil dengan apa yang ditawarkan Indonesia dalam negosiasi ini. Sama halnya dengan Indonesia, Australia memiliki tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Tujuan ekonomi Australia adalah memanfaatkan peluang peningkatan kebangkitan abad Asia, tak terkecuali Indonesia yang telah diproyeksikan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan lima terbesar di dunia diatas Jepang, Prancis, bahkan Jerman. Australia tidak ingin menyalakan kesempatan pertumbuhan Asia ini. Sedangkan dalam tujuan non ekonomi Australia ingin memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra terdekat Australia di kawasan Asia-Pasifik. Dari tujuan tersebut dapat berdampak terhadap pengaruh Australia di kawasan.

IV. 2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum maksimal. Maka dari itu penulis akan merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang akan menambah literasi dalam Hubungan Indonesia – Australia. Adapun penulis akan merekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya akan lebih menarik jika membahas mengenai kasus IA-CEPA dengan menganalisis bagaimana pengaruh IA-CEPA terhadap harmonisasi hubungan kedua negara, yang mana perlu diketahui Indonesia dan Australia dalam beberapa tahun terakhir memiliki rekam yang kurang bagus.

2. *Economic Powerhouse* adalah konsep yang disepakati bersama, bahwa IA-CEPA akan menjadi kekuatan baru di kawasan ataupun global. Dari sudut pandang ini, akan lebih menarik jika dilihat dari pengaruh industri pertanian Australia terhadap industri pertanian Indonesia. Yang mana dalam hal ini, Australia menjamin suplai dalam memenuhi produksi bahan jadi, sedangkan industri pertanian dalam negeri Indonesia pun, belum dapat dimaksimalkan. Maka dari itu penulis merekomendasikan penelitian terkait, bagaimana dampak economic powerhouse terhadap industri pertanian di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- ABS. (2019). *Statistic: Population Clock*. Dipetik Februari 21, 2019, dari ABS:
<https://www.abs.gov.au/>
- Aggarwal, V. K. (2011). Trade Policy in the Asia Pasific: the role of ideas, interest and domestics intitutions. *The Political Economy of the Asia Pasific*, 1-28.
- Australian Governement. (2012). *Australia in the Asian Century - White Paper*. Canberra: Australian Government. Dipetik Oktober 18, 2019
- Australian Government. (2012). *Australia in the Asian Century - White Paper*. Canberra: Australian Government. Dipetik Oktober 28, 2019
- Australian Government. (2012, October 28). *Australian in The Asian Century*. Dipetik Oktober 18, 2019, dari <http://asiancentury.dpmc.gov.au/>,
- Australian Government. (2017). *Australia Foreign Policy White Paper 2017*. Canberra: Australian Government. Dipetik Oktober 31, 2019
- Australian Government. (2019). *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government Australia and Government Indonesia*. Jakarta: -. Dipetik Oktober 10, 2019
- Baldwin, R. E. (2008). Sequencing and Depth of Regional Economic Integration: Lessons for the Americas from Europe. *World Economy*, 5-30.
- BBC News. (2013, November 10). *BIN: Australia menyadap Indonesia sejak 2007*. Dipetik Oktober 21, 2019, dari BBC News:
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

- Beritasatu. (2016, Maret 17). *RI-Australia Sepakat Reaktivasi IA-CEPA*. Dipetik November 1, 2019, dari Beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/355340/riaustralia-sepakat-reaktivasi-iacepa>
- BKPM. (2016). *Peraturan Presiden no. 44 2016*. Jakarta: BKPM.
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Dipetik Maret 15, 2019, dari BPS: <https://www.bps.go.id/>
- Bregsten, C. F. (1996). Globalizing Free Trade. *Foreign Affairs*, 105-120.
- Capling, A. (2008). Australia's Trade Policy Dilemmas. *Australian Journal of International Affairs*, 229-244.
- CNBCIndonesia. (2019, Maret 7). *Waspada! Impor Komoditas Pangan Australia Bakal Makin Deras*. Dipetik Oktober 15, 2019, dari CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190307195417-4-59397/waspada-impor-komoditas-pangan-australia-bakal-makin-deras>
- Cohen, S. B. (2015). *Geopolitics: The Geography of International Relations*. London: Rowman & Littlefield.
- Defence Australia. (2013, - -). *white papper 2013*. Dipetik oktober 23, 2019, dari defence Australia: <http://www.defence.gov.au/WhitePaper2013/docs/>
- Detik.com. (2011, Juni 8). *Australia Stop Ekspor Ternak Hidup Selama 6 Bulan*. Dipetik Oktober 12, 2019, dari Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1655523/australia-stop-ekspor-ternak-hidup-selama-6-bulan>
- Detik.com. (2015, Februari 15). *Protes Eksekusi Mati Bali Nine, Australia Sungguh Rendahkan Demokrasi RI*. Dipetik November 2, 2019, dari Detik

News: <https://news.detik.com/berita/2833630/protes-eksekusi-mati-bali-nine-australia-sungguh-rendahkan-demokrasi-ri>

DFAT. (2013). Canberra: www.dfat.gov.au. Dipetik Maret 5, 2019

DFAT. (2016). Canberra: www.dfat.gov.au. Dipetik Oktober 5 2019

DFAT. (2017). Canberra: www.dfat.gov.au. Dipetik Oktober 5, 2019

DFAT. (2018). Canberra: www.dfat.com. Dipetik Maret 10, 2019

DFAT. (2018). Canberra: www.dfat.com. Dipetik Maret 9, 2019

DFAT. (2018). *Indonesia Country Brief*. Dipetik Oktober 21, 2019, dari DFAT: <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/indonesia-country-brief.aspx>

DFAT. (2018). *New Zealand Country Brief*. Dipetik Oktober 21, 2019, dari DFAT: <https://dfat.gov.au/geo/new-zealand/pages/new-zealand-country-brief.aspx>

DFAT. (2019). *Australia's free trade agreements (FTAs)*. Canberra: DFAT. Dipetik Oktober 29, 2019, dari <https://dfat.gov.au/trade/agreements/pages/trade-agreements.aspx>

DFAT. (2019). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Outcomes*. Canberra: DFAT.

Ditjenppi Kemendag. (2018). *Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Jakarta: Ditjenppi Kemendag.

Dugis, V. M. (2016). Memperkokoh Hubungan Indonesia - Australia. *Global & Strategis*, 311-324.

DW.com. (2011, Juli 6). *Australia Bekukan Ekspor Sapi ke Indonesia*. Dipetik Oktober 5, 2019, dari DW.com: <https://www.dw.com/id/australia-bekukan-ekspor-sapi-ke-indonesia/a-15141088>

- Febrica, S. (2017). *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interest, and Strategies*. *Routledge*, -.
- Fukuyama, F. (1989). *The End of History*. *The National Interest*, 3-18.
- Global Fire Power. (2019). *Country Profile : Indonesia*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari Global Fire Power: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia
- Global Fire Power. (2019). *Country Profile: Australia*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari Global Fire Power: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=australia
- Gumelar, G. (2018, September 8). *IA-CEPA: Investasi Pendidikan Hanya Dibuka untuk Australia*. Dipetik Maret 17, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180907165652-92-328584/ia-cepa-investasi-pendidikan-hanya-dibuka-untuk-australia>
- Haas, E. B. (1980). *Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes*. *Cambridge University Press*, 357-405.
- HARNAS. (2017, Oktober 2). *IA-CEPA, RI-Australia Sulit Selaraskan Kepentingan*. Dipetik Oktober 29, 2019, dari Hariannasional.com: <http://harnas.co/2017/10/02/ia-cepa-ri-australia-sulit-selaraskan-kepentingan>
- Harvey, J. (2016, Mei 26). *Indonesia-Australia Relations: A Year After the Executions*. Dipetik November 20, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/05/indonesia-australia-relations-a-year-after-the-executions/>

- Idntimes. (2018, Februari 4). *10 Universitas Terbaik di Australia Versi QS World University Rankings*. Dipetik November 4, 2019, dari Idntimes: <https://www.idntimes.com/life/education/adeliadwitas/universitas-terbaik-di-asutralia-versi-qs-world-university-rankings-c1c2/full>
- Investor.id. (2015, April 25). *Mengundang Investor Asing*. Dipetik Oktober 10, 2019, dari Investor.id: <https://investor.id/archive/mengundang-investor-asing>
- Jean Pierre Chauffour, J. C. (2010). *Beyond Market Access. Policy Research Working paper*, 16.
- Jennings, p. (2018). *Prospects for the Australia-Indonesia Defence Relationship*. Oregon: Hart Publishing.
- Kemendag. (2016). Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia. Dipetik Maret 10, 2019
- kemendag. (2017). *IA-CEPA*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia. Dipetik Maret 18, 2019
- Kemendag. (2018). Jakarta: Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Dipetik Oktober 24, 2019
- Kemendag. (2018). Jakarta: www.kemendag.com. Dipetik Maret 7, 2019
- kemenristek. (2012). *Undang - undang RI no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2016). *Analisis strategi posisi runding dalam memperkuat kerjasama IA-CEPA*. Jakarta: Kemendag. Dipetik Maret 2, 2019

Kementrian Perdagangan. (2016). *Analisis strategi posisi runding dalam memperkuat kerjasama IA-CEPA*. Jakarta: Kemendag. Dipetik Maret 21, 2019

Kemlu Indonesia. (2016). *Indonesia dan Australia sepakat Reaktivasi IA-CEPA*. Dipetik Oktober 23, 2019, dari Kemlu: <<http://www.kemlu.go.id/canberra/id/arsip/siaran-pers/Pages/>

Kemlu Indonesia. (2016). *Indonesia dan Australia sepakat Reaktivasi IA-CEPA*. Dipetik Oktober 23, 2019, dari Kemlu: <<http://www.kemlu.go.id/canberra/id/arsip/siaran-pers/Pages/>

Korybko, A. (2017, September 21). *21ST-CENTURY GEOPOLITICS OF OCEANIA: AUSTRALIA*. Dipetik Oktober 2, 2019, dari Geopolitca.ru: <https://www.geopolitica.ru/en/article/21st-century-geopolitics-oceania-australia>

Krisiandi. (2017, Juli 19). *Investor Australia Masih Ragu Tanam Modal di Indonesia*. Dipetik Oktober 23, 2019, dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/08/19/05505791/investor-australia-masih-ragu-tanam-modal-di-indonesia?page=all>

Lezi, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Liputan6. (2013, April 26). *Ekspor Sapi Australia ke RI Anjlok*. Dipetik Oktober 30, 2019, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/571262/ekspor-sapi-australia-ke-ri-anjlok>

Liputan6. (2015, April 29). *Duo Bali Nine Dieksekusi Mati, Australia Tarik Dubes dari RI*. Dipetik Oktober 30, 2019, dari Liputan6:

<https://www.liputan6.com/global/read/2222448/duo-bali-nine-dieksekusi-mati-australia-tarik-dubes-dari-ri>

Maggi, G. (2016). Issue Linkage* In: *The Handbook of Commercial Policy* (K. Bagwell and R.W. Staiger, eds.). *Yale University and NBER*, 1-51.

Menteri Luar Negeri Indonesia. (2019, Januari 9). *Pernyataan Pers Tahunan menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2019*. Jakarta: Kemlu.go.id. Diambil kembali dari Kemlu.go.id.

Menteri Perdagangan. (2016). *Mendag: Reaktivasi IA-CEPA Harus Saling Menguntungkan*. Jakarta: Kemendag.

Michael, R. (2018). *Negosiasi Panjang Perjanjian Dagang RI-Australia Akhirnya Rampung*. Jakarta: katadata.co.id.

Millott, M. (2015, Juli 7). *Australia Viewed Through the Indonesian Press*. Diambil kembali dari Internationalaffairs.org: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-viewed-through-the-indonesian-press/>

Papp, D. S. (2001). *Contemporary International Relations: Framework for Understanding (6th edition)*. New York: Routledge.

perdagangan, K. (2016). *Masuki Putaran Ketiga, IA-CEPA Desai Kerja Sama Lebih Modern*. Jakarta: Siaran pers Kemendag. Dipetik Maret 1, 2019

Prihatini, R. (2017, Desember 20). *Indonesia-Australia masih buntu bahas IA-CEPA*. Dipetik Oktober 28, 2019, dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-australia-masih-buntu-bahas-ia-cepa>

- Ramandisyah, M. (2018). Kepentingan Australia membuka kembali penjanjian IA-CEPA. *Universitas Lampung*, -.
- Ravenhill, A. C. (2015). Australia's flawed approach to trade negotiations: and where do we sign? *Australian Journal of International Affairs*, 496-512.
- Ravenhill, J. (2005). Regionalism. *Oxford University Press*, 116-150.
- Ravenhill, J. (2013). Symposium: Australia–US Economic Relations and the Regional Balance of Power Introduction. *Australian Journal of Political Science*, 179-183.
- Renshaw, C. (2018). Indonesia, Australia, and ASEAN. Dalam D. M. Tim Lindsey, *Next Door Stranger?: Indonesia and Australia in The Asia Century* (hal. -). London: Bloomsbury Publishing.
- Rory Medcalf, J. B. (2014). *Defence challenges 2035: Securing Australia lifelines*. Canberra: Lowy Institute.
- Ruangguru. (2019, Juli 23). 9 Universitas Terbaik Indonesia Menurut QS World University Ranking 2019/2020. Dipetik November 4, 2019, dari Ruangguru: <https://blog.ruangguru.com/9-universitas-terbaik-indonesia-menurut-qs-world-university-ranking-2019/2020>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Workspress.
- Satchwell, I. (2017, Maret 7). *Australia-Indonesia trade deal: Dealing with Great Expectations*. Diambil kembali dari Lowyinstitute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/australia-indonesia-trade-deal-dealing-great-expectations>

- Satchwell, I. (2017, Maret 7). *Australia-Indonesia trade deal: Dealing with Great Expectations*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari LowyIntitute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/australia-indonesia-trade-deal-dealing-great-expectations>
- Sinagal, L. C. (2011, Maret 10). *Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II*. Dipetik November 1, 2019, dari Politik Lipi: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>
- Susan, S. (2010). *Paths to International Political Economy*. Brimingham: Rutledge.
- Syafina, D. C. (2018, Oktober 31). *Perdagangan Bebas Indonesia-Australia: Peluang atau Ancaman?* Dipetik Oktober 21, 2019, dari Tirto: <https://tirto.id/perdagangan-bebas-indonesia-australia-peluang-atau-ancaman-c8LJ>
- Telstra Corporation. (2016). *Submission to the Department of Foreign Affairs and Trade on IA-CEPA*. Canberra: Telstra Corporation. Dipetik Oktober 23, 2019
- Tempo.co. (2013, November 18). *Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia*. Dipetik November 4, 2019, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/530578/menlu-tarik-dubes-indonesia-di-australia>
- TEMPO.CO. (2016, Mei 9). *BKPM: Investasi Australia ke Indonesia masih sedikit*. Dipetik Oktober 8, 2019, dari TEMPO.CO:

<https://bisnis.tempo.co/read/769530/bkpm-investasi-australia-ke-indonesia-sedikit/full&view=ok>

Treasury. (2015). *Australian Projections consistent with the 2015 intergenerational report*. Canberra: Treasury.

Umar, B. S. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.

VENABLES, R. E. (2004). *REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION*. Geneva: The Graduate Institution.

Waluyo, A. (2013, November 20). *Presiden Hentikan Sementara Kerja Sama dengan Australia*. Dipetik Oktober 21, 2019, dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-hentikan-sementara-kerja-sama-dengan-australia/1793799.html>

WIPO. (2017, Januari 02). *Statistics Country Profile: Australia*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari WIPO: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AU

WIPO. (2017, Januari 02). *Statistics Country Profile: Indonesia*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari WIPO: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ID

WITS. (2017). *Country Profile: Indonesia*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari WITS: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/IDN>

Workman, D. (2019, Oktober 19). *Australia's Top Trading Partners*. Dipetik Oktober 25, 2019, dari World Top Exports: <http://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners/>

Wu, Z. (2018). Classical geopolitics, realism and the balance of. *Journal of Strategic Studies*, 786-823.

Yeti Indriani, A. (2017). Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indoensia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia. *Andalas Journal of International Studies*, 79-92.

